

## BAB II

### KONSEP PENETAPAN UPAH MENURUT KAPITALISME

#### A. Konsep Ekonomi Kapitalisme

Sistem perekonomian Kapitalisme mula-mula berkembang subur pada negara-negara Barat<sup>1</sup> sejak abad ke-17.<sup>2</sup> Aspek pemilikan *capital*<sup>3</sup> dan mekanisme pasar merupakan unsur yang sangat mempengaruhi jalannya perekonomian, keduanya memiliki pertalian yang sangat erat, karena meskipun gerak ekonomi ditentukan oleh berbagai kekuatan yang ada dalam masyarakat, namun kenyataannya kekuatan tersebut dimiliki oleh para pemilik *capital*. Masalahnya adalah para pemilik sumber daya atau *capital* ini tidaklah menyebar secara merata, sehingga kendali mekanisme pasar berada ditangan segelintir kelompok pemilik *capital* dan pemegang kekuasaan (negara), yang telah

---

<sup>1</sup> Pelaksanaan sistem perekonomian oleh suatu negara cenderung berkaitan erat dengan ideologi politiknya, seperti negara dengan *ideologi liberal*, biasanya akan cenderung menganut ekonomi Kapitalisme. Begitu pula dengan negara yang menganut *ideologi komunis*, biasanya akan cenderung menganut sistem *sosialis*. Ideologi *Liberalisme* dan *Kapitalisme* bagaikan dua anak kembar yang selalu berjalan seiring. Begitu pula *Komunisme* dan *Sosialisme*. Fakta ini dapat dilihat sampai dengan sebelum pertengahan 1980-an, ketika negara Uni Soviet masih utuh, dan Jerman masih terpisah antara Jerman Barat dan Jerman Timur, serta sebelum RRC mengisolasi diri. Semuanya merupakan contoh negara-negara *Komunis* yang menerapkan sistem ekonomi *Sosialis*. Di lain pihak juga dapat dilihat pada negara seperti Amerika Serikat, Australia, Jepang, Jerman Barat, Belanda dan beberapa negara Eropa Barat yang merupakan beberapa contoh negara *Liberal* yang mempraktekkan sistem ekonomi Kapitalisme. Lihat Nazori Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf. Relevansinya dengan Ekonomi Kekinian* (Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2005), 129.

<sup>2</sup> Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro : Suatu Pengantar* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 363.

<sup>3</sup> *Capital* didefinisikan oleh para ahli ekonomi sebagai perangkat komoditi, alat-alat produksi seperti bangunan, mesin dan sebagainya. Para akutansi dan pedagang menggunakan istilah *Capital* merujuk pada suatu jumlah nilai yang terus menerus berubah dari uang ke komoditi dan kembali lagi ke uang. Lihat pada Anthony Brewer, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*, terj. Joebaer Ajoeb (Jakarta: Teplok Press, 1999), 57.

negatif dalam masyarakat. Sebagaimana yang dikutip dari internet dalam “*Sistem Tata Ekonomi*”, sistem perekonomian Kapitalisme dapat didefinisikan sebagai berikut:

Sistem perekonomian Kapitalisme<sup>4</sup> adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonominya seperti memproduksi barang, menjual barang, menyalurkan barang dan lain sebagainya. Dalam sistem ini setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Semua orang bebas melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Dan dalam sistem ini membiarkan kegiatan usaha manusia secara bebas menanggapi keadaan pasar.<sup>5</sup>

### 1. Falsafah sistem ekonomi Kapitalisme

Sistem ekonomi Kapitalisme berkembang karena adanya politik *Kolonialisme dan Imperialisme*<sup>6</sup> ke negara-negara Asia-Afrika yang memiliki

<sup>4</sup> Istilah Kapitalisme berasal dari Karl Marx, yang mencoba membuktikan bahwa sistem Kapitalisme akan hancur karena kontradiksi-kontradiksi yang terkandung di dalamnya. Sebutan negatifnya terutama berasal dari aliran *Marxisme*. Sebetulnya kata Kapitalisme itu salah kaprah karena setiap cara berproduksi tentu menggunakan modal sebagai faktor produksi, dan semua faktor produksi mesti ada yang memiliki. Ciri sistem Kapitalisme adalah siapa yang memiliki modal itu: negara, atau kelompok pengusaha feodal dan antek-anteknya, atau para warga masyarakat atau perorangan berdasarkan hak milik pribadi. Dewasa ini lebih biasa disebut *Neo-Liberalisme*, yang menekankan kebebasan individu dan pasar tetapi juga menerima bahwa dikoreksi oleh campur tangan negara. Peranan pokok dimainkan oleh golongan pengusaha Swasta yang berkecimpung dalam dunia usaha pasar dan negara. Lihat Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 371.

<sup>5</sup> “*Sistem Tata Ekonomi Kapitalisme, Sosialisme, dan Komunisme*,” <http://www.organisasi.org>, diakses tanggal 18 April 2008.

<sup>6</sup> *Kolonialisme dan Imperialisme* merupakan alat untuk melanggengkan kekuasaan dan kekuatan, atas nama keadilan sosial dan persamaan, kami berusaha untuk memecah kekuatan musuh-musuh kita. Dan kami tidak akan berhenti untuk melakukan *eksploitasi*, sehingga akan mempermudah jalan bagi kita untuk menjadi penguasa, dan akan kami lakukan dengan kepemilikan atas tanah-tanah kekuasaan. Lihat Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, terj. Dimyauddin Djuwaini (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 189.

surplus faktor produksi. Sistem ini makin berkembang karena falsafah dasarnya yaitu:<sup>7</sup>

**a. Materialisme**

Merupakan paham yang menjustifikasi bahwa kemajuan ekonomi mesti diukur dengan segala sesuatu yang bersifat material, yang dapat diterima oleh akal dan panca indra. Paham yang melandasi sistem Kapitalisme ini mengukuhkan pandangan bahwa pengejaran terhadap kekayaan alam benda mutlak diperlukan, jika perlu dengan mengabaikan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya.

**b. Rasionalisme**

Perkembangan paham *materialisme* ini dikuatkan dengan meluasnya ajaran *Rasionalisme*, yaitu paham yang menganggap bahwa pertimbangan akal adalah segala-galanya. *Rasionalisme* dalam sistem ekonomi Kapitalisme ini makin menjauhkan sistem ekonomi dari perspektif moral dan etika, sehingga makin mengarah pada pertimbangan teknis dan indikator kemajuan kuantitatif semata.

**c. Individualisme**

Merupakan paham yang berkeyakinan bahwa pusat perhatian setiap aktifitas sosial harus bertumpu pada kepentingan individu. Jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri, maka secara otomatis

---

<sup>7</sup> Edi Suandi Hamid, *Ekonomi Indonesia: Dari Sentralisasi ke Desentralisasi* (Yogyakarta: Uli Press, 2006), 14.

akan terwujud harmoni sosial dan efisiensi ekonomi. Dalam bukunya Heri Sudarsono yang berjudul *Konsep Ekonomi Islam* mengutip dari Adam Smith<sup>8</sup> mengungkapkan ilustrasi bahwa:

Bukan dari kebaikan hati sang pemotong hewan, sang pembuat minuman atau tukang roti, kita mengharapkan santapan kita....tetapi dari kepentingan mereka sendiri. Kita harus berterima kasih bukan kepada prikemanusiaan mereka, tetapi kepada mereka tentang keperluan-keperluan kita, tetapi tentang kepentingan-kepentingan mereka.<sup>9</sup>

Paham ini meletakkan pandangan yang berlebihan terhadap hakekat manusia sebagai *homo economicus* (yaitu bahwa manusia merupakan makhluk ekonomi yang tidak akan terpisah dari kegiatan ekonomi), sekaligus mengabaikan hakekatnya sebagai *homo socius* (yaitu paham bahwa manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain). Paham ini melandasi perkembangan sistem ekonomi Kapitalisme yang menyalurkan sifat-sifat individu yang berwatak egois dan serakah. *Individulisme* menjadi ciri bagi paham Kapitalisme yang sangat melekat yang membentuk orang – orang penindas bagi kaum lemah. Dan ini akan menjadikan banyak ketidakadilan pada masyarakat.

<sup>8</sup> Walau pemikiran-pemikiran tentang ekonomi sudah sangat berkembang pada abad ke-15 pada saat terjadinya revolusi pertanian di Eropa, tetapi pengakuan ilmu sebagai cabang ilmu tersendiri baru diberikan pada abad ke-18, setelah munculnya tokoh Adam Smith (1729-1790) tidak disangsikan lagi merupakan tokoh utama dari aliran ekonomi yang kemudian dikenal sebagai aliran Klasik. Lihat Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 27.

<sup>9</sup> Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), 80.

#### d. Liberalisme

Paham *Individualisme* berkembang dengan dukungan meluasnya ajaran *Liberalisme*<sup>10</sup> yang beranggapan bahwa setiap individu harus diberi kebebasan penuh untuk mengejar kepentingan ekonominya, sebagai hak bawaan dan kodrat manusia. Hanya dengan memberi kebebasan kepada setiap pelaku ekonomi, maka kegiatan ekonomi akan berjalan normal. Pemberian kebebasan diyakini akan diikuti pula dengan ketertiban dalam kehidupan karena adanya tangan ghaib (*invisible hand*)<sup>11</sup> yang secara otomatis akan membawa pada keseimbangan. Kedua paham ini mengokohkan perkembangan sistem ekonomi Kapitalisme yang makin *Immoral* dan *Assosial*.

#### e. Humanisme

Paham *humanisme* merupakan salah satu falsafah sistem Kapitalisme yang menganggap bahwa kebutuhan manusia di dunia inilah yang harus dijadikan pusat perhatian. Sistem ekonomi harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan duniawi manusia, bahkan jika perlu dengan mengabaikan kebutuhan manusia pasca kehidupan dunia, jelas bahwa sistem ekonomi Kapitalisme berkembang makin menjauhi

<sup>10</sup> *Liberalisme* berasal dari kata *Liber* = bebas, yang jelas diinspirasi oleh cita-cita revolusi Perancis (1789) dengan sumbangan "*kebebasan, persamaan, dan persaudaraan*." Dari sini muncullah pandangan bahwa pemerintah sebaiknya membatasi diri pada bidang keamanan dan ketertiban saja, dan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada konsumen dan produsen untuk mengurus kepentingan ekonominya sendiri. Lihat Gilarso, *Ekonomi Makro*, 370.

<sup>11</sup> *Invisiable Hand* merupakan pandangan Adam Smith bahwa mekanisme pasar yang *dimetamorfosis* dengan tangan ghaib akan mengatur bagaimana jalannya keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar. Lihat Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 80.

agama (*sekuler*)<sup>12</sup> karena didasari falsafah yang memang anti agama, dan *humanisme* makin mendominasi (*menghegemoni*) pemikiran masyarakat dunia. Transformasi model sistem Kapitalisme dilakukan tanpa mengubah falsafah dasar sistem tersebut. Bahkan falsafah tersebut makin kokoh karena dikembangkan dan disebarluaskan sehingga menjadi falsafah yang melandasi sistem ekonomi di banyak negara, termasuk di negara-negara yang sedang berkembang.

## 2. Kekuatan dan keterbatasan sistem ekonomi Kapitalisme

Pada sistem ekonomi Kapitalisme memiliki kekuatan dan keterbatasan yang bisa menyebabkan Kapitalisme dapat bertahan sampai sekarang, dan itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

### a. Kecenderungan sistem ekonomi Kapitalisme

Dengan kebebasan ekonomi Kapitalisme mengakibatkan tingginya persaingan di antara sesamanya dalam rangka supaya tidak tersingkir dari pasar,<sup>13</sup> kadang kala orang bertindak tidak benar dalam

<sup>12</sup> *Sekulerisme*, sebagaimana jamak orang mengetahuinya, ia adalah pengalaman (pahit) lokal eropa dan barat dalam menghadapi situasi pergolakan sosial yang terjadi. Di mana pada saat itu telah terjadi pertentangan antara agama (dogma gereja) dengan sejumlah *filosuf* dan *scientist*. Di atas *sekulerisme* inilah, akhirnya dibangun suatu sistem ekonomi *kapitalisme* yang digagas oleh Adam Smith. Lihat Hatta, "Sistem Ekonomi Neoliberalis Kapitalisme dalam Perspektif Nilai-Nilai Etika Islam." <http://jurnal-ekonomi.org/>, diakses tanggal 18 April 2008.

<sup>13</sup> Paham *free-market* (pasar bebas) ini dipertahankan dan dikembangkan oleh mereka yang menamakan dirinya sebagai pendukung ajaran *Classical Liberalism* (Liberal Klasik). F. A. Hayik, salah seorang penerima hadiah Noble, Dosen *University of Chicago*, adalah seorang tokoh dominan di dalam ajaran ini dan banyak menulis buku yang dijadikan rujukan dalam *free-market* dan sekaligus dalam *Classical Liberalism*. Hampir semua penerima hadiah Noble di *The University of Chicago* di kota Chicago Amerika Serikat adalah pahlawan-pahlawan yang berpaham *free-market* ini. Kelompok *think-thank* "Cato Institute" di Washington, DC (AS) adalah satu institusi yang mempertahankan dan mengembangkan paham ini. Demikian pula, ada lembaga bernama "Institute for Humane Studies"

rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tindakan ini lebih diakibatkan sistem ekonomi Kapitalisme yang memiliki kecenderungan sebagai berikut:

- **Kebebasan memiliki harta secara perorangan.**

Negara menjamin kebebasan masyarakat untuk memiliki hartanya, dan mempergunakannya. Setiap usaha yang dipergunakan sesuai dengan kepentingannya diperbolehkan asal tidak mengganggu kepentingan negara. Kebebasan dalam memiliki pada sistem Kapitalisme merupakan bentuk pemahaman negara tersebut terhadap makna “kepemilikan”. Kepemilikan tidak terjadi bila tidak ada usaha untuk mendapatkan harta untuk dimiliki. Segala sesuatu yang mampu untuk digunakan untuk mendapatkan harta menjadi unsur yang penting dalam Kapitalisme, misal faktor produksi.

Aturan norma Kapitalisme sebagai pengontrol kehidupan *materialistis* ini menjadikan masyarakat cenderung lebih memikirkan kegiatan yang lebih efektif dalam mencari harta. Dialektika kehidupan Kapitalis mendorong sikap untuk mementingkan diri sendiri, upaya untuk memenuhi kepentingan diri sendiri kadang kala digunakan lewat jalan memajukan pemenuhan

---

bagian dari *George Mason University di Virginia* yang setiap tahunnya menyelenggarakan training untuk paham *Classical Liberalism* dan memberi dana untuk penelitian dan penulisan tentang paham tersebut, sampai pada praktek. Lihat Qodri Azizy, *Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam: Persiapan SDM dan terciptanya Masyarakat Madani* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 45-46.

kepentingan masyarakat, tetapi sesungguhnya ia lakukan itu untuk memenuhi kepentingan diri sendiri.<sup>14</sup>

- **Kebebasan ekonomi dan persaingan bebas**

Untuk menjaga terjadinya kesinambungan dalam perekonomian, Kapitalisme membatasi usaha-usaha *monopolistik* yang cenderung mengganggu mekanisme pasar. *Monopoli*<sup>15</sup> mengakibatkan harga barang menjadi tinggi, tidak terkelola sumber daya alam, dan menekan pemerintah untuk mendukung posisi pasar *monopolistik*. Oleh karena itu, beberapa negara Kapitalis mengatur mekanisme pasar dengan cara menghilangkan unsur-unsur *monopolistik* di pasar.<sup>16</sup>

Untuk memahami persaingan bebas bukan merupakan hasil rancangan manusia, walaupun mungkin disebabkan oleh tindakan manusia. Dalam arti ini, walaupun ada tujuan akhir yang hendak diketahui, tujuan tersebut tidak lain adalah kelestarian tatanan pasar bebas dan semua mereka yang berada di dalamnya. Kalau ada tujuan tunggal, tujuan pasar bebas ini bukan merupakan sasaran langsung dari setiap pelaku ekonomi. Semua pelaku bahkan tidak tahu tentang

<sup>14</sup>Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 81.

<sup>15</sup> Pasar Monopoli yaitu pasar di mana terdapat satu orang penjual dan banyak pembelinya, kalau untuk pasar monopoli tenaga kerja adalah pasar tenaga kerja di mana para pekerja bersatu dalam suatu persatuan atau Serikat Buruh dalam menawarkan tenaganya. Lihat Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), 356-366.

<sup>16</sup> Pasar bebas adalah sebuah tatanan spontan, sebuah *Cattallaxy*, yang tidak pernah dapat dikendalikan oleh suatu tujuan tunggal, pasar melayani beragam tujuan yang terpisah-pisah dan akan tidak dapat diperdamaikan satu dengan yang lainnya. Lihat Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 81.

tujuan akhir pasar bebas bukan berada dalam benak setiap individu melainkan dalam benak alam.

Persaingan bebas merupakan syarat bagi terjadinya pemberdayaan diberbagai sektor ekonomi, karena dengan persaingan bebas akan mendorong terciptanya efisiensi ekonomi, persaingan bebas yang dikembangkan oleh beberapa negara Kapitalisme secara pasti telah membawa mereka pada kehidupan yang rentan terhadap masalah sosial, dekadensi moral dikalangan remaja, diskriminasi sosial, dan lain sebagainya.<sup>17</sup>

- **Ketimpangan ekonomi**

Dampak dari kebebasan dalam berusaha menyebabkan sumber produksi dikuasai oleh para pengusaha yang memiliki modal besar. Setiap keuntungan usaha mereka digunakan untuk peningkatan kesinambungan produksi. Siklus ini yang mengakibatkan seorang pengusaha dari waktu ke waktu bisa meningkatkan modalnya, sedangkan pekerja sebaliknya dari waktu ke waktu kurang mendapatkan penghasilan yang kurang memadai, apalagi sejumlah pengusaha memberikan penghasilan sama dengan besarnya konsumsi mereka sehingga tidak ada sisa

---

<sup>17</sup> Ibid., 82.

untuk menabung.<sup>18</sup> Dengan keadaan pekerja seperti ini masa depan anak keturunan pekerja tidak bisa lebih baik kesejahteraannya.

Sehingga ketimpangan ekonomi terjadi antara kaum pengusaha dan kaum pekerja. Modal Kapitalisme mengarahkan modal untuk berputar pada kalangan pengusaha saja.<sup>19</sup> Beberapa pengusaha *mengeksploitasi* pekerja dengan mengambil nilai tambah dari pekerjaan mereka, dengan cara pekerjaan mereka dihargai berdasarkan atas berapa besar *output* produksi yang dikeluarkan, fenomena ini lebih memerankan pekerja sebagai mesin dari proses produksi.

#### b. Kelebihan sistem ekonomi Kapitalisme.

Sistem ekonomi Kapitalisme diilhami oleh buku Adam Smith yang berjudul *The Wealth of Nation*.<sup>20</sup> Di dalam buku *The Wealth of*

<sup>18</sup> Setiap tambahan penghasilan akan dialokasikan untuk menambah konsumsi dan tabungan. Besarnya tambahan pendapatan yang menjadi tambahan tabungan disebut kecenderungan menabung marjinal (*Marginal Propersity to Save* disingkat MPS) sedangkan *rasio* antara tingkat tabungan dengan pendapatan disebut kecenderungan menabung rata-rata (*Average Propersity to Save* APS)  $T = C - S$ . Lihat, Rahardja dan Manurung, *Ekonomi Makro*, 42.

<sup>19</sup> Umear Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), 18.

<sup>20</sup> Adam Smith (*The Wealth of Nations*, 1778) menunjukkan bahwa kebebasan berusaha yang didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa. Kebebasan berusaha ini (tanpa *intervensi pemerintah* yang mengatur segala-galanya) tidak akan menelurkan kekacauan sosial karena kebebasan itu dikendalikan oleh "*tangan yang tak kelihatan*", yaitu persaingan bebas. Jadi kebebasan ini tidak berarti tidak ada aturan, pemerintah tetap bertugas menyelenggarakan apa yang perlu demi kepentingan umum. Dan setiap individu tetap terikat oleh aturan hukum dan tuntunan moral dalam berbisnis dan bermasyarakat. Lihat Gilarso, *Ekonomi Makro*, 370.

*Nations* memberikan prinsip utama yang sangat terkenal yakni, *Laissez-faire, Laissez-passer*<sup>21</sup>, prinsip tersebut membawa sistem ekonomi Kapitalisme menjadi tumbuh berkembang dengan pesat karena membawa kebaikan-kebaikan sebagai berikut:

- **Kebebasan**

Para pendukung sistem ekonomi Kapitalisme menyatakan bahwa kebebasan ekonomi sangat bermanfaat untuk masyarakat. Mereka menyebut “*dasar hukum*” ekonomi dan menegaskan bahwa jika dasar hukum diterapkan dengan bebas, ia akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fitrah manusia sebagai makhluk bebas mendukung daya kreatif dalam mengelola sumber daya ekonomi, apabila fitrah terpelihara akan menimbulkan keberanian dalam menyingkapi segala hal. Kebebasan merupakan faktor yang menjadikan Kapitalisme menjadi sistem yang tetap eksis dibanding *sosialisme*.<sup>22</sup> Kebebasan Kapitalisme tidak semata-mata atas

<sup>21</sup> *Laissez-faire, Laissez-passer* adalah pandangan yang sifatnya memberi kebebasan yang maksimal pada para pelaku ekonomi untuk melakukan kegiatan yang disukainya, serta meminimalkan campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Sistem ekonomi ini dinamakan sebagai sistem mekanisme pasar atau sistem pasar bebas. Lihat Benny Susetyo, *Teologi Ekonomi Partisipasi Kaum Awam dalam Pembangunan menuju Kemandirian Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 25.

<sup>22</sup> *Sosialisme* merupakan produk dan perubahan-perubahan sosial yang mengubah masyarakat-masyarakat Eropa diakhir abad ke-18 dan ke-19. Bilamana *komunisme* didasarkan pada gagasan bahwa ekonomi dan politik harus dipisahkan, maka inti pokok dari *sosialisme* (menurut pengertian yang dipakai oleh Durkheim) adalah bahwa *sosialisme* menyarankan agar kedua bidang tersebut harus diasimilasikan. Prinsip utama dari *sosialisme* bukanlah semata-mata bahwa produksi itu harus dipusatkan ditangan negara, akan tetapi bahwa peran negara itu harus seluruhnya merupakan peran ekonomi – di dalam *masyarakat sosialis*, pengelolaan atau tata pelaksanaan ekonomi harus menjadi tugas dasar negara. Jika *komunisme* – yang berusaha keras untuk sejauh mungkin menghindari pengumpulan

penghargaan hidup terhadap sesamanya. Prinsip dasar tentang penghargaan kebebasan Kapitalisme lebih dikarenakan dengan kebebasan manusia akan lebih memberikan nilai tambah dalam produksi.

- **Meningkatkan produksi**

Persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap “produksi” dan “tingkat harga”<sup>23</sup> pada tingkat yang wajar. Keadaan ini akan membantu mempertahankan penyesuaian pada tingkat yang *rasional* diantara kedua variabel tersebut. Persaingan akan mempertahankan tahap keuntungan dan upah pada tingkat yang bisa diterima oleh pasar. Untuk itu, *rasionalitas* dalam berproduksi akan mempertahankan semua perkara pada tahap yang mendasar.<sup>24</sup>

Keseimbangan antara penawaran dan permintaan di pasar merupakan mekanisme yang diperlakukan sebagai bentuk

---

kekayaan – biasanya cenderung kehidupan bagaikan fakir (*ascetic*), maka seharusnya doktrin-doktrin sosialis dibangun. Lihat Anthony Giddens, *Kapitalisme dan Teori Sosial Modern suatu Analisis Karya Tulis Marx, Durkheim dan Max Weber*, terj. Soeheba Kramadibrata (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), 118.

<sup>23</sup> Harga merupakan indikator kelangkaan barang dan jasa yang semakin mahal, berarti semakin langka. Bagi produsen, gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menambah produksi agar keuntungan meningkat. Bagi konsumen, gejala naiknya harga merupakan sinyal untuk menahan diri, menyusun ulang rencana pengeluarannya agar kehidupannya dapat berlanjut. Lihat Rahardja dan Manurung, *Ekonomi Makro*, 305.

<sup>24</sup> Individu dalam kapasitasnya sebagai konsumen yang bertindak secara *rasional* dan memaksimalkan nilai guna (*Utility*) dengan membeli barang-barang dan jasa pada tingkat harga yang paling rendah yang menempati kedudukan tertinggi pada skala prioritas mereka. Demikian juga produsen, ia akan merespon secara pasif permintaan ini dengan melakukan produksi dengan menekan biaya serendah-rendahnya. Lihat Chapra, *Islam dan Tantangan*, 18.

berjalannya ekonomi secara *fair*. Tetapi kadang kala keseimbangan pasar yang ditentukan produsen dan konsumen tidak mampu memenuhi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Maka dalam keadaan ini pasar perlu *diintervensi* guna menyediakan barang yang diperlukan oleh masyarakat luas.

- **Profit motif**

Dalam sistem Kapitalisme, keuntungan menjadi faktor yang menentukan keberlangsungan usaha. Setiap keuntungan diperhitungkan dari usahanya, semakin sedikit kesempatan untuk melakukan usaha semakin kecil ia akan memperoleh keuntungan. Sebaliknya jika ia ingin mendapatkan keuntungan yang lebih besar maka semakin banyak usaha yang dilakukan. Motif mencari keuntungan inilah yang membangun kehidupan Kapitalisme lebih dinamis. Dampak dari keadaan ini perhatian manusia dengan manusia lebih dikarenakan faktor besar keuntungan dari usaha-usahanya.<sup>25</sup>

Mencari keuntungan merupakan faktor pendorong bagi berjalanya mekanisme pasar. Orang yang memiliki fasilitas lebih

---

<sup>25</sup> Timbulnya biaya kesempatan (*Opportunity cost*) berawal dari adanya motivasi manusia dalam memperhitungkan segala kegiatannya atas berapa waktu yang perlu dikerjakan dalam 1 atau 2 jam. Bila pekerjaan lain dalam waktu yang sama dengan jumlah penghargaan sebesar 10 kali, maka dengan waktu yang sama maka harus dihargai sebesar 10 kali juga. Menurut Milton Frizdman Tanggung Jawab Sosial Kapitalisme, adalah "*Bagaimana Meningkatkan Keuntungan*". Lihat Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, 84.

faktor produksi dan *birokrasi* untuk mendapatkan keuntungan akan memiliki peran lebih banyak dalam mempengaruhi mekanisme pasar. Maka orang ingin memiliki fasilitas-fasilitas tersebut dengan tujuan ingin menguasai pasar demi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

### c. Kelemahan sistem ekonomi Kapitalisme

Dari sistem ekonomi Kapitalisme yang sangat menjunjung tinggi kebebasan, ternyata masih banyak kelemahannya, yaitu sebagai berikut:

- **Ketidakmerataan**

Persaingan bebas menimbulkan kecenderungan setiap orang untuk lebih mementingkan kepentingannya sendiri. Bagi orang yang telah berkecukupan dalam bidang ekonomi tidak banyak peduli dengan orang yang kurang mampu, karena kepeduliannya bukan bagian dari kewajibannya. Maka ketimpangan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang *individualis*.

Ketimpangan sosial secara tidak langsung mengubah struktur masyarakat menjadi dua bagian: kaya dan miskin,<sup>26</sup> dengan posisi ini mereka gunakan sebagai *legitimasi* untuk menuntut lebih banyak kepada negara. Yang kaya merasa berhak diberi fasilitas lebih karena

---

<sup>26</sup> Implikasi dari tingkat ketidakmerataan yang tinggi ini, yang telah diteliti di sebagian negara-negara tersebut, adalah bahwa sebagian manusia hidup dalam kemiskinan yang *absolut*. Menurut Bank dunia, 1 milyar orang di dunia ketiga dikategorikan ini. Sebagaimana terdapat di *World Development Report* tentang masalah khusus kemiskinan. Lihat Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme*, 132.

ia ikut membantu pembangunan negara, demikian juga yang miskin merasa bahwa ia berhak dipelihara negara, karena ia miskin akibat kebijakan-kebijakan negara.

- **Timbul ketidakselarasan**

Setiap orang menggunakan kebebasan untuk *mengeksplorasi* sumber daya yang dimilikinya dengan efisien guna memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Keadaan ini yang menyebabkan terjadinya *eksploitasi*<sup>27</sup> sumber daya dengan alasan, segala apa pun yang dikerjakan merupakan upaya untuk *mengaktualisasikan* kebebasan yang dimilikinya. Padahal kebebasan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, di mana manusia yang satu dengan yang lain juga berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan *eksploitatif*.

Apabila prioritas untuk memproduksi barang sosial yang diinginkan tidak dapat diekspresikan dalam mekanisme pasar. Maka kekuatan-kekuatan pasar akan cenderung mendorong keadaan kepada penggunaan sumber-sumber daya yang tidak *efisien* dan tidak merata. Maka tidak akan ada keselarasan dalam kehidupan masyarakat bila menggunakan sistem ini.

---

<sup>27</sup> Sistem Kapitalisme bisa dikategorikan sebagai bentuk penjajahan. Jika penjajahan diartikan sebagai proses eksploitasi tenaga manusia demi kemaslahatan sebagian orang dengan mengorbankan kemaslahatan orang banyak, maka dengan sistem ini akan menimbulkan sikap diktator dan kebebasan individu untuk menguasai orang lain. Lihat Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, 194.

ia ikut membantu pembangunan negara, demikian juga yang miskin merasa bahwa ia berhak dipelihara negara, karena ia miskin akibat kebijakan-kebijakan negara.

- **Timbul ketidakselarasan**

Setiap orang menggunakan kebebasan untuk *mengeksplorasi* sumber daya yang dimilikinya dengan efisien guna memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Keadaan ini yang menyebabkan terjadinya *eksploitasi*<sup>27</sup> sumber daya dengan alasan, segala apa pun yang dikerjakan merupakan upaya untuk *mengaktualisasikan* kebebasan yang dimilikinya. Padahal kebebasan merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari manusia, di mana manusia yang satu dengan yang lain juga berupaya untuk melakukan tindakan-tindakan *eksploitatif*.

Apabila prioritas untuk memproduksi barang sosial yang diinginkan tidak dapat diekspresikan dalam mekanisme pasar. Maka kekuatan-kekuatan pasar akan cenderung mendorong keadaan kepada penggunaan sumber-sumber daya yang tidak *efisien* dan tidak merata. Maka tidak akan ada keselarasan dalam kehidupan masyarakat bila menggunakan sistem ini.

---

<sup>27</sup> Sistem Kapitalisme bisa dikategorikan sebagai bentuk penjajahan. Jika penjajahan diartikan sebagai proses eksploitasi tenaga manusia demi kemaslahatan sebagian orang dengan mengorbankan kemaslahatan orang banyak, maka dengan sistem ini akan menimbulkan sikap diktator dan kebebasan individu untuk menguasai orang lain. Lihat Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, 194.

- **Maksimasi profit**

*Efisiensi* usaha bisa dijadikan *legitimasi* untuk menaikkan batas produksi dan mengurangi biaya guna mendapatkan keuntungan yang maksimal.<sup>28</sup> Hal ini dilakukan sebagai alasan bagi pengusaha untuk mempertahankan produksi dan memenangkan persaingan usaha dengan pihak lain, kadang kala kuatnya pengaruh orientasi ini menjadikan pengusaha kurang mempertimbangkan kesejahteraan tenaga kerja bagian dalam terselenggaranya produksi.

- **Krisis moral**

Dalam Kapitalisme setiap orang berusaha mengejar kekayaan supaya mendapatkan peran lebih di dalam masyarakat. Hal ini mengakibatkan perencanaan atau penjadwalan dalam mendapatkan kekayaan mendominasi hidup manusia dari hari ke hari. Keadaan ini mempersempit ruang bagi manusia untuk berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Akhirnya hal ini yang mengakibatkan manusia kehilangan unsur-unsur kemanusiaannya (*dehumanisme*) dan terasing oleh dirinya sendiri (*aliensi*).<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Dalam masyarakat Kapitalis, keuntungan (*profit*) selain memuaskan nafsu untuk menimbun kekayaan produktif, juga merupakan bagian dan ekspresi diri. Karena itu, keuntungan dipercaya dapat memotivasi manusia untuk bekerja keras dan produktif. Lihat Rahardja dan Manurung, *Ekonomi Makro*, 364.

<sup>29</sup> Kekerasan *alienatif* merujuk pada pencabutan hak-hak individu yang lebih tinggi, misalnya hak perkembangan *emosional*, budaya atau *intelektual*. Pentingnya mendefinisikan dan memasukkan hak-hak asazi manusia yang demikian ke dalam jenis kekerasan alienatif ini adalah untuk menegaskan bahwa keberadaan manusia juga membutuhkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan non materi. Kepuasan kerja, kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan kreatif, kebutuhan anak-anak akan

Kapitalisme telah menjerumuskan manusia pada sikap yang memperlakukan keadaan (*excuse*), segala sesuatu yang terjadi dianggap sebagai fenomena kehidupan yang tidak terelakkan. Demikian juga dengan masalah nilai bagi masyarakat Kapitalisme tidak diarahkan pada pemahaman salah satu nilai, tetapi masyarakat diberi berbagai alternatif pilihan untuk memilih nilai yang dianggapnya paling baik.<sup>30</sup>

- **Mengesampingkan kesejahteraan**

Konsep Kapitalisme cenderung memahami pertumbuhan ekonomi lebih harus diperhatikan dari pada pemerataan ekonomi, karena pemerataan akan timbul setelah adanya pertumbuhan ekonomi (*trickle down effect*).

Kebijakan ini merupakan dampak dari mekanisme modal yang cenderung berputar pada kalangan pengusaha.<sup>31</sup> Apabila pengusaha mendapatkan keuntungan, maka secara tidak langsung akan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini menjadikan kesejahteraan masyarakat terabaikan.

---

kasih sayang, rasa kepemilikan secara sosial atau identitas budaya adalah contoh-contoh hak asasi tersebut di atas yang dimungkinkan untuk dilanggar, secara sengaja atau tidak. Lihat Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme*, 38.

<sup>30</sup> Chapra, *Islam dan tantangan Ekonomi*, 61-63.

<sup>31</sup> Salah satu bentuk kekerasan *alienatif* yang paling kejam adalah apa yang disebut dengan *ethnocide*, yakni kebijakan atau tindakan yang betul-betul mengubah kondisi material atau sosial menjadi di bawah satu identitas kultural kelompok tertentu. Kebijakan ini bisa dijalankan dengan banyak cara. Lihat Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme*, 39.

### 3. Aktualisasi dan problematika sistem ekonomi Kapitalisme

Apabila dilihat dari aspek sejarah (*historis*), ekonomi Kapitalisme baru menjadi satu wacana ilmu pengetahuan setelah Adam Smith menulis buku *An inquiry into the Nature an Causes of The Wealth of Nations*, pada tahun 1776. ekonom berkebangsaan Skotlandia ini memperkenalkan sistem ekonomi *liberalis kapitalis* untuk menentang sistem ekonomi *Merkantilisme* yang sangat menekankan pada campur tangan pemerintah dalam memajukan perekonomian. Adam Smith agaknya lebih menghendaki kegiatan ekonomi itu berjalan sesuai dengan logikanya sendiri, menurut dia pasar yang akan mengatur aktifitas ekonomi, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utamanya dalam berekonomi mesti digerakkan membebaskan mekanisme pasar itu sendiri.

Sebagaimana diketahui sistem ekonomi *liberalis kapitalis* ternyata berdampak negatif bagi sebagian besar kalangan. Di antaranya adalah penyebab tingkat pendapatan yang tidak merata, meningkatnya kemiskinan serta semakin lebarnya kesenjangan sosial. Ekses itu terjadi akibat pasar yang bekerja maksimal menjadikan persaingan bebas yang tidak bisa dihindari. Akibatnya hanya pengusaha kuat saja yang memenangkan persaingan, sebaliknya penguasa kecil hanya sebagai obyek yang dipastikan kalah dan akan dikalahkan, selanjutnya bahkan akan tersisih dan dimarginalkan.

Sistem ekonomi *liberalis kapitalis* yang dimotori oleh Adam Smith secara relative telah berhasil memajukan tingkat perkembangan ekonomi. Namun sistem ini pula telah mengorbankan manusia dan menggiringnya ke dalam ketergantungan yang tinggi, perbudakan ekonomi, dan ketersaingan produk serta hidup itu sendiri.

Namun demikian, persoalan tersebut segera diselamatkan oleh John Maynard Keynes, menurutnya perekonomian sepenuhnya tidak harus diserahkan pada mekanisme pasar, tetapi dalam batas-batas tertentu turun tangannya pemerintah justru kadang mutlak diperlukan. *Intervensi* negara menjadi suatu keniscayaan terutama dalam hal mendorong perekonomian ke posisi keseimbangan. Keynes sangat beda dengan Smith padangan Keynes tersebut menjadi sebuah “revolusi” dalam pemikiran ekonomi *liberalis kapitalis* yang berkembang selama ini.<sup>32</sup>

## B. Pengertian Upah Menurut Kapitalisme

Karena nilai<sup>33</sup> di dalam pandangan Kapitalisme diciptakan oleh kerja, maka Kapitalisme menganggap bahwa “*nilai kerja*” sebagai suatu yang *absurd*.

Kalau memang pekerja diupah untuk kerjanya, atau karena nilai yang ia ciptakan,

<sup>32</sup> Keynes adalah pakar ekonomi (1883-1946). lihat Deliarnov, *Perkembangan Ekonomi*, 137-140.

<sup>33</sup> Nilai (tanpa *kualifikasi*) komoditi adalah waktu yang dibutuhkan secara sosial untuk memproduksi komoditi itu, nilai dalam arti ini mengutamakan dan secara tidak langsung menentukan *nilai tukar* (harga), menganggap bahwa harga-harga akan seimbang dengan nilai-nilai, nilai-nilai juga dinyatakan dalam pengertian nilai-nilai komoditi lainnya, biasanya berupa komoditi uang, yaitu suatu *ekuivalensi universal*. Komoditi punya *nilai-pakai*, suatu kapasitas pemuas keinginan dan *nilai-tukar*, barang dapat ditukar dengan barang lainnya, nilai pakai dalam persyaratan bagi *nilai-tukar*. Lihat Brewer, *Das Kapital*, 301-302.

maka ia harus diupah secara penuh dan tidak menyisakan nilai lebih.<sup>34</sup> Jika tidak demikian, ia diupah kurang dari nilai yang ia ciptakan, suatu hal yang akan memperkosa prinsip “*nilai ditukar nilai*”. Jika tidak, cara demikian menjadi tidak mungkin untuk menjelaskan Kapitalisme berdasarkan pertukaran dari nilai-nilai yang sama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Anthony Brewer dalam bukunya *Das Kapital*, upah menurut Kapitalisme didefinisikan sebagai berikut:

Sistem yang digunakan Kapitalisme untuk membeli tenaga kerja dan menyadap nilai lebih, upah kerja mengandung adanya *eksistensi* kapital dan upah<sup>35</sup> merupakan imbalan finansial langsung yang dibayarkan kepada karyawan berdasarkan jam kerja, jumlah barang yang diberikan atau banyaknya pelayanan yang diberikan.<sup>36</sup>

Dalam pandangan Kapitalisme tenaga kerja pada dasarnya adalah faktor produksi yang tidak berbeda dengan faktor produksi lainnya, misalnya barang-barang modal. Oleh karenanya, tingkat upah (*Wage rate*) yang merupakan harga dari tenaga kerja akan ditentukan berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran dalam pasar tenaga kerja.<sup>37</sup> Jadi tingkat upah akan ditentukan

<sup>34</sup> Nilai lebih adalah bentuk dari kerja lebih yang diekstrakan oleh sistem Kapitalisme, sumber dari semua kekayaan Kapitalisme dimungkinkan karena nilai yang diciptakan kerja harian pekerja melebihi nilai-nilai tenaga kerja (yang ia peroleh sebagai pendapatan atau upah). *Ibid.*, 303.

<sup>35</sup> Ahli ekonomi membagi upah menjadi dua yaitu: Upah uang adalah jumlah uang yang diterima oleh para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi. Sedangkan Upah riil adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Lihat Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 351.

<sup>36</sup> Brewer, *Das Kapital*, 294.

<sup>37</sup> Pasar tenaga kerja dapat dibedakan dalam beberapa jenis yaitu: (1), Pasar tenaga kerja yang bersifat *persaingan sempurna*, yaitu di dalam pasar tersebut tenaga kerja maupun perusahaan-perusahaan tidak mempunyai persatuan yang bertindak sebagai wakil mereka. Di dalam pasar tenaga kerja yang seperti itu sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. (2), Pasar tenaga kerja *Monopsoni*, yaitu pasar tenaga kerja di mana satu pengusaha merupakan pembeli tunggal dari jasa tenaga kerja yang ditawarkan. (3), Pasar tenaga kerja

berdasarkan *market wage*. Karena tenaga kerja pada dasarnya dianggap sama seperti barang-barang modal maka hukum permintaan dan penawaran barang akan berlaku dalam penentuan tingkat upah. Jika penawaran tenaga kerja berlimpah sementara permintaan terhadap tenaga kerja kecil maka tingkat upah akan rendah. Sebaliknya, jika penawaran tenaga kerja sangat terbatas sementara permintaannya sangat kuat maka tingkat upah akan tinggi, kenaikan atau penurunan permintaan dan penawaran tenaga kerja dengan sendirinya akan berpengaruh pada tingkat upah.<sup>38</sup>

Secara teoritis, baik produsen maupun tenaga kerja memiliki peluang untuk menentukan tingkat upah.<sup>39</sup> Keduanya dapat mempengaruhi titik

---

*Monopoli*, yaitu pasar tenaga kerja di mana para pekerja bersatu dalam suatu persatuan atau serikat buruh dalam menawarkan tenaganya. (4), Pasar *monopoli* di kedua belah pihak (*monopoli bilateral*), yaitu di dalam pasar tenaga kerja perusahaan adalah pembeli tunggal jasa tenaga kerja, dan tenaga kerja secara bersama (*melalui serikat buruh*) menawarkan tenaganya. Lihat Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 353.

<sup>38</sup> Yang disebut tingkat upah adalah taraf balas karya rata-rata yang berlaku umum dalam masyarakat untuk segala macam pekerjaan. Tingkat upah ini dapat diperhitungkan per jam, hari, minggu, bulan atau tahun. Lihat Gilaso, *Ekonomi Mikro*, 211.

<sup>39</sup> Upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting: untuk pihak produsen (majikan), upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Tetapi untuk pihak karyawan upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya dan keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya tingkat upah atau gaji langsung menyangkut pribadi manusia, harga diri dan statusnya dalam masyarakat, serta merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat sebagai keseluruhan. Oleh karena itu, masalah upah merupakan masalah yang peka dan hangat dibicarakan, persoalan pengupahan ibarat lingkaran syetan bagi industri, buruh, dan pemerintah. Di satu sisi, jika pemerintah tidak menaikkan upah, kondisi buruh semakin tertekan dan ini dapat menciptakan kerawanan sosial yang jauh lebih hebat dari sekedar orang hidup di bawah garis kemiskinan. Di sisi lain, dengan menaikkan upah buruh berarti hilangnya daya saing, karena keunggulan *kompetitif* yang dimiliki industri *manufaktur nasional* bukan terletak pada produk dan *efisiensi infrastruktur secara birokrasi*, tetapi pada buruh yang murah, menghadapi kondisi dilematis ini, posisi pemerintah lebih condong ke kepentingan pengusaha dan kurang berani menaikkan upah pada tingkat yang wajar untuk memberi hidup lebih sedikit manusiawi kepada para buruh. Ironisnya, dengan kondisi yang serba *marginal* itu, sering pengusaha menuntut *produktivitas* yang tinggi ke buruh sebelum menaikkan upah minimal yang diminta, tanpa mau mendukung langkah yang dapat memberikan nilai tambah ke buruh, seperti pendidikan dan latihan kerja. Lihat Eggi Sudjana, *Buruh Menggugat : Prespektif Islam* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 88.

keseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Tetapi, dalam dunia nyata nasib tenaga kerja dalam perekonomian Kapitalisme seringkali menyedihkan. Tenaga kerja harus bersaing dengan tenaga mesin, tenaga robot, dan alat-alat fisik lain yang dapat menjadi *substitusi* bagi tenaga kerja manusia.<sup>40</sup> *Efisiensi produksi* dan motivasi untuk memaksimalkan tingkat keuntungan akan mendorong para produsen untuk menggunakan tenaga kerja yang lebih murah dan memiliki *produktivitas* tinggi.<sup>41</sup> Dengan alasan hal ini maka banyak produsen yang mengganti tenaga kerja manusia dengan mesin-mesin produksi sehingga permintaan terhadap tenaga kerja semakin menurun. Fenomena seperti ini nampak jelas pada perekonomian di negara-negara maju dan berkembang. Akibatnya, tingkat upah tenaga kerja manusia akan cenderung menurun karena kalah bersaing dengan mesin, para pekerja (*employee*) sering kali dipaksa atau terpaksa menerima tingkat upah yang rendah, bahkan tidak cukup memadai bagi suatu kehidupan yang layak.<sup>42</sup>

<sup>40</sup> Masuknya permesinan dalam proses produksi menandai tahap *produksi modern*, mengandung dua tema: *Pertama*, permesinan menggantikan para pekerja dan sekaligus memungkinkan para wanita dan anak-anak masuk ke angkatan kerja. Permintaan akan tenaga kerja berkurang, sedang angkatan kerja meningkat. Cadangan tenaga-kerja yang menganggur senantiasa diperbaruhi, kekuatan berunding para pekerja amat merosot. *Kedua*, sebagai pemantapan kecenderungan itu, mekanisasi mengakhiri pemusnahan keterampilan pekerja bekas (merdeka) dan mendudukan mereka kepada kekuasaan kapital. Permesinan yang pada prinsipnya dapat meringankan kerja, malah mengintensifkan kerja. Lihat Brewer, *Das Kapital*, 85-86.

<sup>41</sup> *Produktivitas* dapat didefinisikan sebagai produksi yang diciptakan oleh seorang pekerja pada suatu waktu tertentu, kenaikan *produktivitas* berarti pekerja itu dapat menghasilkan lebih banyak pada jangka waktu yang sama atau suatu tingkat produksi tertentu dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Kenaikan *produktivitas* disebabkan oleh beberapa faktor: yang terpenting adalah (I), kemajuan teknologi memproduksi. (II), Pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja. (III), Perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Lihat Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 353.

<sup>42</sup> Hendri Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islam* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 225-226.

Memang dalam kenyataan saat ini penentuan upah tidaklah mengikuti cara yang *ekstrim*. Dalam perekonomian Kapitalisme juga sering dijumpai *intervensi* pemerintah<sup>43</sup> dalam wujud penentuan kebijakan pengupahan (misalnya kebijakan minimum) dan jaminan sosial keselamatan bagi pekerja, sebagaimana banyak terjadi di negara-negara industri Barat. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa dalam perekonomian Kapitalisme peranan mekanisme pasar dalam penentuan upah tetap dominan.<sup>44</sup>

Di dalam sistem penetapan upah menurut Kapitalisme konsep pasar bebas sangat dominan dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pada pasar tenaga kerja seperti itu sifat-sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja tidak berbeda dengan sifat-sifat permintaan dan penawaran di pasar barang. Kurva permintaan ke atas tenaga kerja, seperti juga kurva permintaan ke atas suatu barang, bersifat menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Berarti permintaan

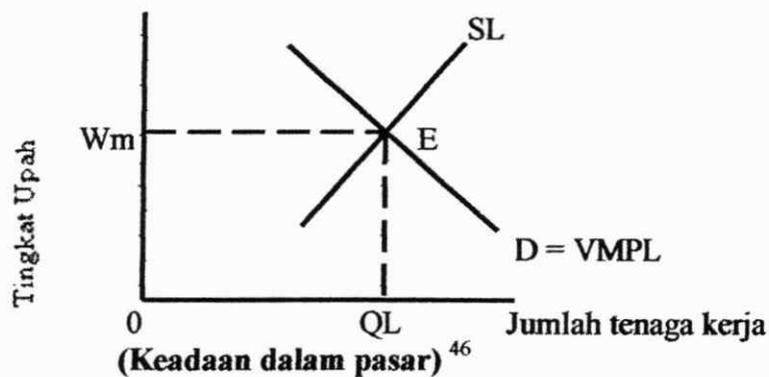
<sup>43</sup> Ketika pemerintah melakukan *intervensi* dengan menaikkan dasar minimum. Upah itu yang diikuti dengan pengawasan secara ketat terhadap upah minimum, ternyata muncul reaksi keras dari beberapa kelompok industri yang keberatan dengan adanya kenaikan tersebut. Beberapa kelompok industri itu terutama yang bersifat padat karya, seperti industri sepatu, tekstil, elektronik, rokok, kecap, dan garmen. Dengan kenaikan itu, banyak pengusaha yang merasa diperlakukan tidak adil karena hanya dipaksa memenuhi kewajibannya tanpa ada kesempatan menuntut haknya. Banyak kalangan pengusaha menilai sejumlah langkah Menteri tenaga kerja akhir-akhir ini tidak netral dan terlalu berpihak ke kelompok pekerja atau buruh. Bahkan, sejumlah keputusannya itu dinilai sangat pincang, *vulgar*, dan kental nuansa politisnya, dengan menyudutkan pengusaha. Adakalanya, di lingkungan industri seperti itu, *margin* antara harga jual dan biaya produksi sangat tipis. Karenanya akan terasa sangat memberatkan jika perubahan atau kenaikan UMR terjadi dalam tenggang waktu dekat, yaitu dua kali dalam setahun, ini memberatkan perusahaan karena pihak manajemen antara lain tidak mungkin bisa menegosiasi kembali kesepakatan harga dengan *buyer* dalam waktu pendek. Lihat Sudjana, *Buruh Menggugat*, 91-92.

<sup>44</sup> Dalam masyarakat kita jumlah pencari kerja jauh lebih banyak dari pada jumlah lowongan sehingga para pencari kerja masih berada di pihak yang lemah. Jumlah pengusaha atau majikan hanya sedikit, mereka mempunyai kedudukan yang lebih kuat (bahkan mungkin mempunyai kedudukan monopoli) sehingga dapat menekan tingkat upah, kemampuan perusahaan untuk membayar upah pun sangat berbeda-beda, demikian pula kebijakan penggajiannya. Dengan demikian tidak ada persaingan murni di pasar tenaga kerja. Lihat Gilarso, *Ekonomi Mikro*, 214.

ke atas tenaga kerja bersifat: *Semakin tinggi atau rendah upah tenaga kerja, semakin sedikit atau banyak permintaan ke atas tenaga kerja.* Kurva penawaran tenaga kerja seperti juga kurva penawaran barang, bersifat menaik dari kiri bawah ke kanan atas, sifat penawaran yang seperti ini berarti, makin tinggi upah makin banyak tenaga kerja yang bersedia menawarkan tenaga kerjanya.<sup>45</sup>

Berdasarkan kepada sifat permintaan dan penawaran tenaga kerja seperti yang diterangkan di atas, di dalam gambar 1 ditunjukkan penentuan tingkat upah di pasar tenaga kerja:

**Gambar 1**  
**Penentuan upah**  
**dalam pasar perekonomian Kapitalitisme**



**Keterangan:**

- Wm = Wage market
- QL = Quantitas of labour
- SL = Supply of labour
- E = Ekuilibrium
- D = Demand
- VMPL = Value of marginal product of labour

<sup>45</sup> Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 355-356.

<sup>46</sup> Anto, *Ekonomika Mikro Islami*, 227.

Dari gambar 1 menunjukkan bahwa kurva  $D = VMPL$  (*value of marginal product of labour*) adalah kurva permintaan ke atas tenaga kerja, dan kurva  $SL$  (*supply of labour*) adalah penawaran ke atas tenaga kerja.  $QL$  (*Quantitas of labour*) adalah jumlah tenaga kerja dan tingkat upah  $Wm$  (*wage market*). Dengan demikian keseimbangan dicapai pada titik  $E$  (*ekuilibrium*), yang berarti jumlah tenaga yang digunakan  $QL$  dan tingkat upahnya adalah  $Wm$ .<sup>47</sup>

Dalam gambar 2 akan ditunjukkan sistem pengupahan dalam perusahaan yang berbasis ekonomi Kapitalisme, yaitu sebagai berikut:



Keterangan:

- $Wm$  = Wage market
- $QL$  = Quantitas of labour
- $SL$  = Supply of labour
- $D$  = Demand
- $E$  = Ekuilibrium
- $VMPL$  = Value of marginal product of labour

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 303.

Pada gambar 2 menunjukkan permintaan dan penawaran tenaga kerja di suatu perusahaan, ini berarti perusahaan harus membayar upah sebesar  $W_m$  kepada para pekerja yang digunakannya, dan pada tingkat upah ini ia dapat memperoleh semua tenaga kerja yang diperlukannya. Maka kurva  $SL$  adalah kurva penawaran tenaga kerja kepada perusahaan itu. Kurva  $D = VMPL$  menggambarkan permintaan tenaga kerja oleh perusahaan tersebut. Maka ekuilibrium dicapai dititik  $E$ , dan demikian jumlah tenaga kerja yang digunakan oleh perusahaan tersebut sebanyak  $QL$ .<sup>49</sup>

### 1. Sistem Upah

Ada berbagai cara atau sistem bagi Kapitalisme untuk memperhitungkan besarnya upah atau balas karya, yang terpenting adalah.

#### a. Upah menurut waktu

Besarnya upah ditentukan atas dasar lamanya waktu karyawan melakukan pekerjaan bagi majikan. Bisa dihitung per jam, per hari, per minggu atau per bulan.<sup>50</sup>

Sistem ini terutama dipakai untuk jenis pekerjaan yang hasilnya sukar dihitung per potong. Cara ini memungkinkan mutu pekerjaan yang baik karena karyawan tidak tergesa-gesa, administrasinya pun dapat sederhana. Tetapi perlu pengawasan apakah karyawan sungguh-sungguh

<sup>49</sup>Ibid.

<sup>50</sup> Biasanya upah yang ditetapkan berdasarkan sistem waktu hanya didasarkan kepada lamanya bekerja bukan dikaitkan dengan prestasi kerjanya. Lihat Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 376.

bekerja selama jam kerja (atau hanya duduk-duduk sambil membaca surat kabar....)

Dalam sistem ini perekonomian Kapitalisme sebagaimana yang dijelaskan oleh Anthony Brewer dalam bukunya yang berjudul *Das Kapital*, upah menurut waktu dapat didefinisikan sebagai berikut:

Upah hanyalah bentuk yang dibuat untuk membayar tenaga kerja. Upah per jam adalah nilai (atau, tegasnya, harga) dan tenaga kerja sehari dibagi dengan jumlah jam kerja normal per hari. Ia sama seperti harga seekor kuda ditentukan melalui harga kaki kuda. Lalu dikalikan dengan empat. Dan terdapatlah harga kuda seekor itu. Harga dari kekuatan-kerja ditentukan, normalnya sekian per jamnya.<sup>51</sup>

Untuk sistem upah menurut waktu perpanjangan hari-kerja yang biasa, berarti pengurangan upah per jamnya. Harga (upah) sesungguhnya dapat berselisih dengan nilai dari kekuatan kerja.<sup>52</sup>

#### **b. Upah menurut Potongan**

Dalam sistem potongan, besarnya upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, seperti per potong, meter, liter, dan kilogram. Besarnya upah yang dibayar selalu didasarkan kepada

<sup>51</sup>Brewer, *Das Kapital*, 100.

<sup>52</sup> Harga atau Upah tersebut bisa dikatakan berselisih apabila waktu kerja yang diminta untuk menghasilkan nilai dari tenaga kerja itu terdapat perpanjangan hari kerja yang biasa sehingga menghasilkan nilai lebih (*surplus labour*) bagi perusahaan atau majikan dan ini dinamakan sebagai bentuk *eksploitasi* dari pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Lihat *Ibid.*, 291.

banyaknya hasil yang dikerjakan bukan kepada lamanya waktu mengerjakannya.<sup>53</sup>

Sistem perekonomian Kapitalisme sebagaimana yang dijelaskan oleh Anthony Brewer, mendefinisikan upah menurut potongan adalah sebagai berikut:

Upah sering juga dibayar menurut potongan yang dihasilkan dalam sejamnya. Ini memberi kesan bahwa pekerja menjual produk yang ia hasilkan, yang sebenarnya tidak demikian. Produk itu bukan miliknya, ia hanya mendapat upah sesuai dengan nilai tenaga kerjanya. Tidak menurut nilai produk itu. Upah normal untuk satu potong adalah nilai sehari tenaga kerja dibagi dengan jumlah potongan yang dihasilkan dalam kondisi rata-rata lamanya kerja harian. Kerja potongan mengurangi, sebenarnya meniadakan, kebutuhan untuk superintens dan (pengawas). Karena itu cocok untuk industri domestik dan kerja yang disubkontrakkan. Ia membantu meningkatkan *intensitas kerja*, suatu bentuk harmonis dari cara produksi Kapitalisme.<sup>54</sup>

Dengan cara ini besarnya balas karya langsung dikaitkan dengan prestasi kerja karena besarnya upah tergantung dari banyak sedikitnya hasil yang dicapai dalam waktu tertentu. Cara ini hanya dapat diterapkan kalau hasil kerja bisa diukur secara *kuantitatif* (dengan memperhitungkan kecepatan mesin, kualitas bahan yang dipakai, dan lain-lain).<sup>55</sup>

<sup>53</sup> Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 376.

<sup>54</sup> Brewer, *Das Kapital*, 101.

<sup>55</sup> Dari pihak pengusaha pertimbangan terpenting dalam menentukan upah atau gaji adalah prestasi kerja atau *produktivitas (marginal)*. Bila *produktivitas* tenaga kerja rendah, upahnya juga akan rendah.

## 2. Faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan tingkat upah

Dalam suatu negara, nilai produk ditentukan oleh kerja yang dibutuhkan untuk produksi, dengan taraf rata-rata *intensif produktivitas*. Kerja yang lebih *intens* atau *produktive*, menghasilkan lebih banyak nilai. Dalam skala dunia negeri yang *produktivitasnya* secara normal, relatif lebih tinggi dari negeri lainnya. Akan menghasilkan lebih banyak nilai dibanding negeri lainnya.<sup>56</sup>

*Produktivitas* dan intensitas kerja menanjak begitu Kapitalisme berkembang. Jadi kerja satu jam akan menciptakan lebih banyak nilai di suatu negeri yang maju dibandingkan dengan negeri yang kurang maju,<sup>57</sup> karena barang-barang yang diproduksi oleh negara maju dan kurang maju akan dijual di pasar dunia pada waktu yang bersamaan. Dari sini, nilai tukar dengan nilai di pasar dunia dan nilai pertukaran itu tidak sama. Kemudian timbullah

---

Di negara-negara maju terutama kenaikan *produktivitaslah* yang menyebabkan tingkat upah rata-rata tinggi. Perlu dicatat bahwa *produktivitas* kerja sangat dipengaruhi oleh banyak sedikitnya faktor-faktor produksi lain yang membantu, khususnya mesin-mesin dan peralatan canggih serta teknik produksi yang dipakai inilah masalah pokok mengapa negara-negara berkembang tingkat upah umumnya rendah. Lihat Gilarsso, *Ekonomi Mikro*, 215.

<sup>56</sup> Brewer, *Das Kapital*, 102.

<sup>57</sup> Struktur ekonomi dan taraf perkembangan negara ikut mempengaruhi tingkat upah yang berlaku dalam masyarakat misalnya: penambahan penduduk yang tidak dapat ditampung lagi di sektor pertanian, masih kurangnya industri, banyaknya pengangguran (kelebihan tenaga yang tak terdidik) bersamaan dengan kekurangan tenaga ahli, masih sulitnya transportasi dan komunikasi, perbedaan-perbedaan lokal daerah dan kota antara perusahaan nasional dan perusahaan asing. Misalnya, jika banyak pengangguran, kaum buruh (serikat buruh) akan sulit sekali menuntut kenaikan upah. Banyaknya orang terpaksa menerima upah yang rendah (bahkan dibawah upah minimum) yang terpenting bagi mereka mendapat pekerjaan. Lihat Gilarsso, *Ekonomi Mikro*, 215.

perbedaan tingkat upah pada suatu negara tertentu dan semua perbedaan tingkat upah tersebut tidak lepas karena beberapa faktor sebagai berikut:

**a. Permintaan dan penawaran tenaga kerja**

Permintaan dan penawaran tenaga kerja dalam suatu jenis pekerjaan sangat besar peranannya dalam menentukan upah disuatu jenis pekerjaan.<sup>58</sup> Di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang cukup besar tetapi tidak banyak permintaannya, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang rendah. Sebaliknya, di dalam suatu pekerjaan di mana terdapat penawaran tenaga kerja yang terbatas tetapi permintaannya sangat besar, upah cenderung untuk mencapai tingkat yang tinggi.<sup>59</sup> Perhatikan saja perbedaan pendapatan akuntan dan ahli ekonomi. Penawaran ahli ekonomi relatif lebih banyak dari penawaran akuntan. Maka walaupun permintaan ke atas mereka relatif

<sup>58</sup>Seperti diketahui, ciri utama pasar tenaga kerja di Indonesia sampai sekarang ini masih timpang antara permintaan dan penawaran (*monopsonistis*). Struktur tenaga kerja yang *monopsonistis* ini terutama ditandai oleh sedikitnya perusahaan yang meminta tenaga kerja dan banyak sekali pencari kerja. Pengertian jumlah ini tidak harus mengacu kepada fisik, tetapi juga pada proses pengambilan keputusan. Struktur pasar yang demikian akan menempatkan pekerja dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan pengusaha (perusahaan). Ini tentu saja akan berimplikasi pada hubungan pengupahan di antara keduanya, jangan heran jika pekerja dibayar lebih rendah dari nilai *produktivitas* yang mereka hasilkan. Artinya, pekerja menerima imbalan yang lebih rendah dibandingkan sumbangan yang mereka berikan ke perusahaan. Selisih antara *produktivitas* dan upah yang diterima pekerja inilah yang sering disebut sebagai *eksploitasi*. Lihat Sudjana, *Buruh Menggugat*, 83.

<sup>59</sup>Persoalan pengupahan ini disebut pokok dari sekian banyak persoalan perburuhan banyak disebabkan persoalan ini. Bahkan, persoalan-persoalan lain langsung atau tidak langsung, disebabkan atau dipicu persoalan upah. Secara kasar dapat disebut persoalan uang, kondisi ini sungguh sangat memprihatinkan. Upah menjadi kata kunci bagi pihak-pihak dalam mengelola konflik kepentingan antara pengusaha, buruh, dan pemerintah. Oleh karena itu, agar menjadi tepat penglihatan kita atas peta persoalan pekerja, kita harus melihat *realitas obyektif* pasar kerja dan politik ketenagakerjaan yang berlaku karena keberadaannya yang sangat penting dalam mempengaruhi hubungan industrial itu. Lihat *Ibid.*, 82.

hampir sama, ahli ekonomi menerima upah yang lebih rendah dari akuntan.

**b. Perbedaan corak pekerjaan**

Kegiatan ekonomi meliputi berbagai jenis pekerjaan. Ada di antara pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang ringan dan sangat mudah dikerjakan. Tetapi ada pula pekerjaan yang harus dikerjakan dengan mengeluarkan tenaga fisik yang besar, dan ada pula pekerjaan yang harus dilakukan dalam lingkungan yang kurang menyenangkan.<sup>60</sup>

Perhatikan saja pekerjaan seorang buruh yang bekerja di kantor yang ada penyaman udaranya (AC) dengan pekerja pertanian, ataupun pekerja-pekerja lapangan. Golongan pekerja yang belakangan ini biasanya akan menuntut dan memperoleh upah yang lebih tinggi dari pada buruh kantor karena mereka melakukan kerja yang lebih memerlukan tenaga fisik dan bekerja dalam keadaan yang kurang menyenangkan.

**c. Perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan**

Kemampuan, keterampilan, dan keahlian para pekerja di dalam suatu jenis pekerjaan adalah berbeda. Secara lahiriah segolongan pekerja mempunyai kepandaian, ketekunan, dan ketelitian lebih baik. Sifat tersebut menyebabkan mereka mempunyai *produktivitas* yang lebih tinggi.

---

<sup>60</sup> Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 364.

Maka para pengusaha biasanya tidak segan-segan untuk memberikan upah yang lebih tinggi kepada pekerja yang seperti itu.<sup>61</sup>

Dalam perekonomian yang semakin maju kegiatan-kegiatan ekonomi semakin memerlukan tenaga terdidik. *Manajer profesional*, tenaga teknik, tenaga akuntan, dan berbagai tenaga profesional lainnya yang selalu diperlukan untuk memimpin perusahaan modern dan menjalankan kegiatan memproduksi secara modern. Biasanya makin rumit pekerjaan yang diperlukan, makin lama masa pendidikan dari tenaga ahli yang diperlukan. Maka pendidikan yang panjang tersebut menyebabkan tidak banyak tenaga kerja yang dapat mencapai taraf pendidikan yang tinggi. Kekurangan penawaran seperti itu menyebabkan upah yang diperoleh tenaga terdidik adalah lebih tinggi dari pada para pekerja yang lebih rendah pendidikannya. Di samping itu tenaga kerja yang lebih tinggi pendidikannya memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, karena pendidikannya mempertinggi kemampuan kerja dan selanjutnya kemampuan kerja menaikkan *produktivitas*.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Antara karyawan yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan yang besar dalam hal pendidikan, keahlian, pengalaman, dan sikap mental. Dalam hal ini pengujian harus dibedakan juga kedudukan karyawan sebagai tenaga tetap atau tidak tetap. Perbedaan upah dirasakan tidak wajar apabila tidak atau kurang ada keseimbangan antara prestasi kerja dan besar balas karya. Misalnya, perbedaan antara "Pejabat Tinggi" dan "Pegawai Rendahan" dalam departemen atau perusahaan yang sama dirasakan terlalu menyolok. Demikian pula perbedaan antara departemen atau perusahaan yang sejenis (misalnya, gaji pegawai Departemen Keuangan lebih tinggi dari pada gaji rekan-rekan mereka di departemen lainnya. Lihat Gilarso, *Ekonomi Mikro*, 214-217.

<sup>62</sup> Dalam keadaan apapun sebuah perusahaan memiliki komitmen untuk memperoleh keuntungan usaha agar dapat tetap hidup. Tanpa keuntungan mereka tidak dapat memberikan daya tarik tersendiri yang cukup untuk para *investor* untuk mempertahankan daya saing. Oleh karena itu, sebuah perusahaan bisa jadi tidak mampu membayar karyawannya lebih besar dari pada kontribusi yang

**d. Pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan**

Daya tarik suatu pekerjaan bukan saja tergantung kepada besarnya upah yang ditawarkan. Ada tidaknya perumahan yang tersedia, jauh dekatnya kepada rumah pekerja, apakah ia ada di kota besar atau di tempat yang terpencil, dan adakah pekerja tersebut harus terpisah dari keluarganya atau tidak sekiranya ia menerima tawaran suatu pekerjaan, adalah beberapa pertimbangan tambahan yang harus dipikirkan. Juga harus dipertimbangkan suasana kerja di dalam perusahaan yang dimasuki. Adakah hubungan yang baik di antara pekerja, misalnya adalah suatu pertimbangan yang harus difikirkan dalam menentukan tingkat pendapatan yang ditentukannya.

Faktor-faktor bukan keuangan di atas mempunyai peranan yang cukup penting pada waktu seseorang memilih pekerjaan. Seseorang seringkali bersedia menerima upah yang lebih rendah apabila beberapa pertimbangan bukan keuangan sesuai dengan keinginannya. Sebaliknya pula, apabila faktor-faktor bukan keuangan banyak yang tidak sesuai dengan keinginan seorang pekerja, ia akan menuntut upah yang lebih tinggi sebelum ia bersedia menerima yang ditawarkan.<sup>63</sup>

---

diberikan karyawan dalam bentuk *produktivitas*. Namun demikian jika hal ini harus terjadi, misalnya karena keterbatasan pekerja dan kekuatan serikat kerja, perusahaan harus merancang kembali pekerjaan-pekerjaan mereka. Melatih karyawan baru untuk meningkatkan pasokan pekerja, *otomatisasi*, *inovasi*, atau keluar dari bisnis. Lihat Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 775.

<sup>63</sup> Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 365.

#### e. Ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja

Dalam teori seringkali dimisalkan bahwa terdapat *mobilitas* faktor-faktor produksi, termasuk juga *mobilitas* tenaga kerja.<sup>64</sup> Dalam konteks *mobilitas* tenaga kerja pemisalan ini berarti : kalau dalam pasar tenaga kerja terjadi perbedaan upah, maka tenaga kerja akan mengalir ke pasar tenaga kerja yang upahnya lebih tinggi. Perpindahan tersebut akan terus berlangsung sehingga tidak terdapat lagi perbedaan upah.<sup>65</sup> Pemisalan ini adalah sangat berbeda dengan kenyataan yang wujud di dalam praktek. Upah dari suatu pekerjaan di berbagai wilayah dan bahkan di dalam suatu wilayah tidak selalu sama. Salah satu faktor yang menimbulkan perbedaan tersebut adalah ketidaksempurnaan dalam *mobilitas* tenaga kerja.

*Faktor geografis* merupakan salah satu sebab yang menimbulkan ketidaksempurnaan *mobilitas* tenaga kerja. Adakalanya di tempat-tempat tertentu terdapat masalah kekurangan buruh walaupun tingkat upah lebih

<sup>64</sup> Tenaga kerja umumnya tidak begitu *mobile* (kecuali kaum muda yang justru belum berpengalaman). Oleh karena itu, pasar tenaga kerja terbagi atas sejumlah besar pasar lokal (per daerah atau pulau) dan sektor (pertanian, industri, perdagangan, dan jasa). Padahal ada perbedaan-perbedaan yang cukup menyolok antara kota dan desa, antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Antara pulau yang satu dengan pulau yang lain. Dengan demikian pasar-pasar kerja setempat tak dapat disamakan, dan tak ada satu tingkat upah yang berlaku umum. Lihat Gilarso, *Ekonomi Mikro*, 214.

<sup>65</sup> Dengan asumsi *mobilitas* sempurna dari faktor-faktor produksi, setiap faktor produksi menerima imbalan senilai tambahan hasil *marginalnya* dan imbalan itu sama untuk berbagai alternatif penggunaan atau proses produksi. Demikian juga setiap pengusaha adalah *price taker*, artinya tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Pengusaha menjual hasil produksinya menurut harga pasar dan membeli faktor produksi dengan harga pasar juga. Dilihat pada pihak buruh, buruh tidak bersedia tidak menerima upah yang lebih rendah dari nilai usaha kerja. Bilamana pengusaha tertentu membayar upah yang lebih rendah dari nilai usaha kerja buruh, buruh dengan adanya asumsi *mobilitas* sempurna, akan memperoleh upah senilai pertambahan hasil *marginalnya*. Persoalannya, pertambahan hasil *marginal* buruh selama ini lebih besar dari upah yang dibayarkan. Pengusaha dapat menambah keuntungan dengan menambah buruh. Di lain pihak, pengusaha tentu tidak bersedia membayar upah yang lebih besar dari nilai usaha kerja yang diberikan buruh ke pengusaha. Lihat Sudjana, *Buruh Menggugat*, 89-90.

tinggi, sedangkan di tempat lain terdapat pengurangan dan tingkat upahnya relatif rendah. Dalam keadaan seperti itu adalah wajar apabila para penganggur tersebut pindah ke tempat di mana kekurangan tenaga kerja dihadapi. Dalam kenyataannya perpindahan tersebut belum tentu berlaku, keengganan untuk meninggalkan kampung halaman dan sanak saudara seringkali mencegah orang untuk pindah ke tempat lain, walaupun upah dan kesempatan untuk maju lebih besar.

Ketidaktepatan dalam *mobilitas* tenaga kerja disebabkan pula oleh *faktor-faktor institusional*. Di pekerjaan-pekerjaan tertentu terdapat organisasi-organisasi profesional yang berusaha membatasi kemasukan tenaga profesional yang baru. Tujuannya adalah untuk menjamin supaya pendapatan mereka tetap berada pada tingkat yang tinggi. Di negara kita faktor *institusional* tidaklah merupakan faktor yang penting yang menghambat *mobilitas* tenaga kerja. Tetapi di beberapa negara, pembatasan *institusional* tersebut adakalanya cukup serius, sebagai contoh, serikat-serikat buruh di Amerika Serikat adakalanya menuntut kepada majikan untuk tidak mengambil pekerja yang tidak menjadi anggota serikat buruh.<sup>66</sup>

Jika melihat faktor-faktor penyebab perbedaan tingkat upah, maka krusialnya persoalan pengupahan secara umum tidak dapat dilepaskan dari

---

<sup>66</sup> Serikat buruh bisa menjadi kekuatan yang sangat besar dalam suatu perusahaan, yang dapat memaksa perusahaan untuk memberikan upah atau gaji yang lebih besar bila dibandingkan dengan hasil *evaluasi jabatan*. Lihat Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 381.

peran yang secara fungsional merupakan bagian atau sama dengan pendapatan bagi tenaga kerja, tetapi merupakan ongkos dari perusahaan.<sup>67</sup> Karena itu, jika besarnya itu dirubah, otomatis akan mengurangi atau menambah bagian yang akan di terima masing-masing pihak, sehingga wajar jika di antara pihak-pihak itu mencoba mendapatkan bagian yang paling besar, tentunya atas pengorbanan pihak lain. Karena kedudukan upah sangat sentral bagi kelangsungan hidup masing-masing pihak, upah senantiasa menjadi persoalan serius dan kajian banyak ilmuwan, khususnya ekonomi.<sup>68</sup>

### C. Aspek-Aspek Normatif Dalam Konsep Penetapan Upah Menurut Kapitalisme.

Bila seorang karyawan telah mencurahkan tenaga dengan sebaik-baiknya, ia berhak menerima upah yang sekurang-kurangnya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Ini tuntutan keadilan. Pada sebagian perusahaan upah uang (*nominal*) dilengkapi dengan tunjangan-tunjangan (beras, pakaian kerja, perumahan) dan fasilitas-fasilitas lain seperti rumah dinas, penjemputan, dan

---

<sup>67</sup> Dari sisi *politis*, keberadaan upah buruh memiliki arti paling penting sebagai pembangun hubungan industrial yang harmonis ketika upah buruh semakin meningkat, kesenjangan antara manajemen dan buruh semakin menipis, sehingga semakin kecil pula alasan buruh untuk melakukan *konflik industrial* atas dasar persoalan pengupahan. Artinya, jika persoalan upah dapat ditangani dengan baik, sementara persoalan lain tidak cukup kuat mengorbankan *konflik industrial* yang *radikal* atau tidak menjadi *variabel*. Misalnya, karena tuntasnya persoalan ini. Lihat Sudjana, *Buruh Menggugat*, 86.

<sup>68</sup> *Ibid.*, 87.

sebagainya. Sehingga upah riil lebih tinggi.<sup>69</sup> Pada sistem upah Kapitalisme konsep keadilan dan kelayakan dapat dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Asas Adil

Besarnya upah dan gaji yang dibayar kepada setiap karyawan harus disesuaikan dengan prestasi kerja, jenis kerja, resiko pekerjaan, tanggung jawab, jabatan pekerja, dan memenuhi persyaratan *internal konsistensi*.<sup>70</sup>

Untuk itu upah dipandang adil kalau memenuhi 4 syarat yaitu:

- a. Sesuai dengan prestasi kerja. Untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah dikembangkan berbagai sistem evaluasi jabatan.<sup>71</sup>
- b. Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk bisa hidup layak dengan keluarganya. Untuk "hidup layak" tidak ada satu ukuran yang umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi

<sup>69</sup> Gilarso, *Ekonomi Mikro*, 215-216.

<sup>70</sup> Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 380.

<sup>71</sup> Evaluasi jabatan adalah proses sistematis untuk menentukan nilai relatif dari suatu pekerjaan dibandingkan dengan pekerjaan lain. Proses ini adalah untuk mengusahakan tercapainya *internal equity* (jumlah yang diperoleh dipersepsi sesuai dengan *input* yang diberikan dibandingkan dengan pekerjaan yang sama dalam perusahaan) dalam pekerjaan sebagai unsur yang sangat penting dalam penentuan tingkat upah. Penilaian pekerjaan secara umum dilakukan dengan mempertimbangkan isi pekerjaan atau faktor-faktor seperti tanggung jawab, keterampilan atau kemampuan, tingkat usaha yang dilakukan dalam suatu pekerjaan, dan lingkungan kerja. Penilaian umumnya dilakukan oleh ahli atau panitia yang sengaja dibentuk oleh organisasi untuk melakukan evaluasi. Anggota panitia tersebut hendaknya orang-orang yang akrab dengan jabatan yang dibicarakan, di mana masing-masing mungkin memiliki perspektif yang berbeda tentang sifat pekerjaan dan sebaliknya juga mengikutsertakan karyawan. Dalam melakukan evaluasi ditemukan beberapa metode yang bisa dipraktekkan, yaitu: (1) Metode peningkatan (*job ranking*). (2) Metode Pengelompokan (*job grading*). (3) Metode perbandingan faktor-faktor. (4) Metode penentuan poin (*point system*). Lihat Gary Dessler, *Human Resource Management*, terj. Elli Tanya (Jakarta: PT. Indek, 2005), 81.

kebutuhan-kebutuhan pokok pekerja dan keluarganya, terutama dalam masa *inflasi*<sup>72</sup> kalau harga-harga naik.

- c. Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tidak mampu membayar upah tinggi, maka upah yang rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang dibayar itu rendah, berarti melanggar keadilan dan moral
- d. Sesuai situasi dan kondisi setempat. Misalnya, gaji di Jakarta umumnya lebih tinggi tetapi biaya hidup sehari-hari (makanan, perumahan, angkutan umum, dan sebagainya), juga jauh lebih mahal.

Jadi adil di sini bukan berarti setiap karyawan menerima upah dan gaji yang sama besarnya, tetapi di sini atas keadilan tercipta apabila dapat *merefleksikan* suasana-suasana sebagai berikut:

- Kerja sama

Dewasa ini semakin disadari bahwa majikan dan buruh, usahawan dan karyawan, meskipun memang ada perbedaan kepentingan dan cara berfikir, namun sama-sama berkepentingan dalam memajukan perusahaan. Hubungan perburuhan berdasarkan keadilan menuntut agar

---

<sup>72</sup> *Inflasi* adalah kenaikan harga secara terus menerus. Tingginya angka *inflasi* yang selanjutnya akan menurunkan daya beli masyarakat juga mendorong dunia usaha akan berfikir dua kali bila ingin berusaha atau mengembangkan usahanya. Untuk bisa bertahan pada tingkat daya beli seperti sebelumnya para pekerja harus mendapatkan gaji paling tidak sebesar tingkat *inflasi*. Kalau tidak, pekerja tidak lagi mampu membeli barang-barang yang diproduksi masyarakat atau dunia usaha itu. Lihat Sudjana, *Buruh Menggugat*, 100-101.

hak-hak buruh diakui dan dihormati. Dalam perusahaan modern, personalia memegang peranan yang penting dalam usaha membangun hubungan perburuhan yang baik, membuat orang "senang" di perusahaan serta menampung atau menyalurkan keluhan dan keinginan para karyawan. Pemerintah menganjurkan agar soal-soal upah dan syarat-syarat kerja dirundingkan bersama dan dirumuskan dalam suatu perjanjian perburuhan. Bila ada perselisihan hendaknya diselesaikan secara "baik-baik". Dalam perundingan antara pihak majikan dan kaum buruh (serikat buruh), masalah kenaikan harga atau biaya hidup, perbandingan upah, kemampuan perusahaan dan kenaikan *produktivitas* merupakan pokok bahasan yang utama.<sup>73</sup>

- Semangat kerja

Dengan keadilan yang diterapkan pada perusahaan maka tentu akan menimbulkan semangat kerja pada karyawan untuk lebih meningkatkan prestasi maupun kerjanya, selain itu dengan upah yang adil karyawan akan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik, status sosial, dan *egoistiknya* sehingga memperoleh kepuasan kerja.<sup>74</sup>

- Loyalitas

Jika upah dan gaji yang diberikan dirasakan dapat memenuhi asas keadilan, maka karyawan secara otomatis juga akan menunjukkan

---

<sup>73</sup> Dengan program upah dan gaji yang baik pengaruh serikat buruh dapat dihindarkan, dan karyawan akan berkonsentrasi pada pekerjaannya. Lihat Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, 380.

<sup>74</sup> *Ibid.*, 379.

*loyalitasnya* pada perusahaan. Dengan begitu manajer juga akan mudah memotivasi para karyawannya.

- Stabilitas karyawan

Dengan program upah dan gaji atas prinsip keadilan maka stabilitas karyawan lebih terjamin karena *turn over* relatif kecil dan perpindahan ke perusahaan sejenis dapat dihindarkan.<sup>75</sup>

- Disiplin

Dengan pemberian upah dan gaji yang baik maka disiplin karyawan semakin baik. Karyawan akan menyadari serta mentaati peraturan-peraturan yang berlaku pada perusahaan.<sup>76</sup>

## 2. Asas layak dan wajar.

Upah dan gaji yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Tolok ukur layak adalah relatif, penetapan besarnya upah dan gaji didasarkan atas batas upah minimal pemerintah dan *eksternal eksistensi* yang berlaku. Manajer personalia diharuskan selalu memantau dan menyesuaikan upah dan gaji dengan *eksternal konsistensi* yang sedang berlaku. Hal ini penting supaya semangat kerja dari karyawan yang *Qualified* tidak berhenti, tuntutan serikat buruh dikurangi, dan lain-lain.<sup>77</sup>

<sup>75</sup> Ibid., 380.

<sup>76</sup> Program upah dan gaji sesuai dengan undang-undang perburuhan yang berlaku (seperti batas upah minimum) maka *intervensi pemerintah* dapat dihindarkan. Ibid., 379-380.

<sup>77</sup> Secara umum upah minimum belum mampu mencukupi kebutuhan hidup di Indonesia. Walaupun hal ini harus dikembalikan lagi kepada individu masing-masing. Kebutuhan setiap individu tentunya bervariasi, kenaikan harga-harga kebutuhan, baik primer maupun sekunder, terkadang tidak diikuti oleh kenaikan upah minimum, tidak semudah membalikkan tangan. Masalah upah berkaitan erat

Untuk dapat mengetahui sistem upah yang diterima karyawan itu sudah memenuhi kriteria layak atau belum, salah satunya dengan cara menghitung *upah riil* karyawan tidaklah sederhana seperti membandingkan upah (*nominal*) yang diterima dibandingkan dengan harga-harga kebutuhan sekarang. Dalam ekonomi terdapat jenis barang dan jasa. Dari tahun ke tahun mereka mengalami kenaikan atau perubahan harga yang tidak seragam. Ada yang tidak mengalami kenaikan, ada yang mengalami kenaikan harga yang tinggi dan ada yang kenaikan harganya relatif lambat. Di samping itu, berbagai jenis barang tersebut sangat berbeda kepentingannya dalam hidup manusia. Ada yang sering dibeli konsumen, seperti makanan, pakaian, dan sewa rumah. Ada pula yang pembelian ke atasnya tidak terlalu sering dilakukan seperti misalnya, membeli rumah dan mobil, atau melancong ke luar negeri. Perbedaan ini menimbulkan efek yang berbeda kepada kesejahteraan masyarakat sekiranya harga barang-barang tersebut menjadi bertambah tinggi. Masalah-masalah yang baru saja diuraikan ini menimbulkan kesulitan dalam usaha untuk menunjukkan tingkat perubahan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian dari tahun ke tahun. Ini selanjutnya menyebabkan *upah riil* dari tahun ke tahun sukar untuk di hitung.<sup>78</sup>

Setiap negara biasanya menggambarkan perubahan harga-harga di dalam perekonomiannya dengan menciptakan *Indeks Harga*, yaitu suatu

---

dengan penjual nasi: begitu sensitif untuk ditetapkan, kalau terlalu rendah para pekerja marah. Sebaliknya, para pengusaha juga akan "mogok" kalau upah menjadi terlalu tinggi. Ibid., 383.

<sup>78</sup>Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 351.

indeks yang memberikan gambaran tentang tingkat rata-rata dari perubahan harga-harga dari waktu ke waktu. Salah satu dari *indeks harga* tersebut adalah *indeks harga konsumen*. *Indeks harga* ini dapat digunakan untuk menaksirkan *upah riil* para pekerja dari tahun ke tahun.

Berdasarkan pada *indeks harga* dari tahun ke tahun yang mengalami perubahan maka untuk menghitung upah ini dapat diketahui melalui tabel sebagai berikut.<sup>79</sup>

**Tabel 1**  
**Menghitung upah riil pekerja**

<b>Tahun (1)</b>	<b>Upah uang (2)</b>	<b>Indeks harga (3)</b>	<b>Upah riil (4)</b>
1995	100.000	100	$100/100 \times \text{Rp}100.000 = \text{Rp}100.000$
1997	150.000	125	$100/125 \times \text{Rp} 150.000 = \text{Rp} 120.000$
2000	200.000	150	$100/150 \times \text{Rp} 200.000 = \text{Rp} 125.000$
2005	600.000	400	$100/400 \times \text{Rp} 600.000 = \text{Rp} 150.000$

Keterangan:

- Upah uang: jumlah uang yang diterima oleh para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran ke atas tenaga mental atau fisik para pekerja yang digunakan dalam proses produksi.
- Indeks harga: yaitu suatu indeks yang memberikan gambaran tentang tingkat rata-rata perubahan harga-harga dari waktu ke waktu.
- Upah riil adalah: tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa-jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja.<sup>80</sup>

<sup>79</sup> Ibid., 352.

<sup>80</sup> Ibid.

Dalam tabel (1) ditunjukkan suatu contoh hipotesis mengenai perhitungan *upah riil* dengan menggunakan pertolongan *indeks harga* barang konsumen. Angka-angka dalam kolom (2) menunjukkan upah uang rata-rata yang diterima oleh pekerja-pekerja dari suatu kegiatan ekonomi tertentu dalam satu bulan. *Indeks harga* barang konsumen ditunjukkan dalam kolom (3). Berdasarkan kepada nilai upah uang dalam kolom (2) dan *indeks harga* barang konsumen dalam kolom (3), dalam kolom (4) dihitung dan ditunjukkan *upah riil* dari berbagai tahun yang dinyatakan dalam kolom (1).

Dari angka-angka dalam tabel 1 dapat diambil kesimpulan bahwa: walaupun di antara tahun 1995-2005 upah uang telah menjadi 6 kali lipat (dari Rp 100 ribu menjadi Rp 600 ribu), kenaikan *upah riil* hanyalah mencapai *satu-setengah* kali lipat (dari Rp 100 ribu menjadi Rp 150 ribu). Perbedaan yang besar tersebut adalah disebabkan oleh kenaikan harga-harga sebesar 4 kali lipat dalam tempo 1995-2005.

Untuk hal ini upah (*nominal*) yang rendah kerap kali dilengkapi dengan tunjangan-tunjangan seperti : Makan 1 kali atau 2 kali di perusahaan, pakaian kerja, pengobatan gratis, perumahan murah, penjemputan, dan sebagainya. Ada juga perusahaan yang mengkaitkan upah dengan *indeks biaya hidup atau harga beras*, dengan demikian *upah riil* akan konstan meskipun ada *inflasi*. Juga sering dipakai istilah "*sliding scale*", yaitu upah karyawan berubah-ubah dengan besar kecilnya hasil perusahaan. Kalau semuanya berjalan dengan baik dan menguntungkan, upah ikut naik, tetapi

kalau hasil perusahaan hanya sedikit, upah buruh pun hanya sedikit. Sebenarnya hal ini dialami oleh setiap orang yang berwirausaha sendiri, tetapi bila diterapkan pada kaum buruh dirasa kurang adil.<sup>81</sup>

Agar *upah riil* tidak terlalu ketinggalan dengan kebutuhan hidup dan kenaikan harga, maka untuk penentuan upah minimum dapat ditentukan melalui kebutuhan oleh seorang bujangan dan oleh seorang karyawan atau pegawai dengan satu istri dan dua orang anak. Jumlah-jumlah ini dinyatakan dalam harga pasar yang berlaku dan menunjukkan berapa upah minimum yang seharusnya dibayar oleh perusahaan (dan dapat dituntut oleh kaum buruh), sayangnya masih sering kali dilanggar.<sup>82</sup>

Apabila dalam sebuah perusahaan tidak mampu untuk membayar upah dengan wajar, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya permasalahan sebagai berikut:

1. Penyedotan tenaga kerja, dengan menawarkan upah yang jauh lebih baik. Misalnya: Jakarta menghisap tenaga-tenaga dari kota-kota lain, perusahaan asing menyedot tenaga-tenaga ahli dari perusahaan nasional, perusahaan swasta makin banyak menarik tenaga (yang berpendidikan) dari instansi pemerintah.

---

<sup>81</sup> Gilarso, *Ekonomi Mikro*, 218.

<sup>82</sup> Menghisap tenaga sesama manusia yang tak berdaya dengan membayar upah terlalu rendah, menahan upah buruh yang berhak menerimanya, memperkaya diri dengan "pungutan dan potongan" gaji bawahannya dan lain-lain, merupakan pelanggaran yang serius terhadap keadilan dan kelayakan, yang oleh para nabi sejak zaman dahulu sudah dikecam sebagai dosa yang mendatangkan murka Tuhan Yang Maha Adil, dan jelas pula bertentangan dengan moral. Lihat *Ibid.*, 219.

2. Pergantian tenaga kerja (*labour turn over*) tinggi : tenaga yang baik mudah tergoda untuk pindah ke perusahaan lain di mana ia mendapat gaji atau fasilitas lebih baik, sehingga perusahaan-perusahaan segan untuk membiayai pendidikan atau latihan karyawannya.
3. Perasaan "tidak puas" dalam masyarakat karena perbedaan penghasilan yang terlalu menyolok dirasa bertentangan dengan keadilan, lebih-lebih kalau penghasilan besar diperoleh dengan jalan tidak halal dan dipamerkan dengan gaya hidup mewah. Hal ini juga mudah mendorong orang untuk ikut "main" atau "korupsi".<sup>83</sup>

Apabila terjadi pemberian upah yang tidak layak maka perusahaan sendiri akan dirugikan dengan akibat tersebut, maka dari itu harus adanya komunikasi yang baik antara perusahaan dengan buruh untuk menentukan upah yang mengandung kelayakan dan keadilan serta diikuti dengan kontribusi buruh untuk meningkatkan *produktivitasnya* sehingga dari kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Akibat korupsi, upah buruh terpaksa ditekan rendah, karena uang yang semestinya diberikan ke buruh sudah diambil para koruptor yang melakukan pungutan liar, melalui peraturan-peraturan yang menghambat kegiatan ekonomis, struktur intensif lain yang menghidupkan kegiatan-kegiatan yang bersifat *rent seeking* seperti yang biasa timbul, dan berbagai macam *licensi* serta pemberian hak-hak monopoli tertentu, adanya "*kewajiban*" *ceremonial* yang hanya membebani kegiatan ekonomi (misalnya upacara-upacara pembukaan, peresmian, dan hura-hura lain) dan membebani biaya tambahan pada suatu kegiatan ekonomi tetapi tidak meningkatkan *produktivitas* dan sebagainya. Karena itu, jika pungutan liar dan praktek-praktek *inefisiensi* dalam perusahaan itu dapat dikurangi, bahkan dihapuskan, kemungkinan besar porsi upah buruh dapat meningkat dari struktur harga pokoknya yang sekarang berlaku. Lihat Sudjana, *Buruh Menggugat*, 97.

<sup>84</sup> *Ibid.*, 103.

#### D. Pandangan Tokoh-Tokoh Kapitalisme Tentang Konsep Penetapan Upah

Konsep penetapan upah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perusahaan dan buruh, karena menyangkut proses produksi perusahaan dan juga kelangsungan hidup buruh tersebut. Dalam konsep penetapan upah menurut Kapitalisme ini didasarkan atas beberapa teori-teori yang dikeluarkan oleh aliran-aliran ekonomi maupun tokoh-tokoh ekonomi di antaranya adalah:

##### 1. Pandangan Kaum Klasik

Dalam pandangan teori klasik<sup>85</sup>, tata kerja pasar faktor produksi itu sama seperti pasar-pasar lain : *Permintaan dan penawaran bersama-sama menentukan harga pasar, dan harga pasar ikut menentukan berapa yang dijual dan berapa yang dibeli.* Bila penawaran banyak tetapi permintaan hanya sedikit, tingkat harga (upah) akan menjadi rendah. Tetapi bila harga (upah) tinggi, lebih banyak orang akan tertarik pada pekerjaan yang berupah tinggi itu, sehingga penawaran bertambah. Seperti halnya harga untuk barang atau jasa lain, demikian pula tinggi rendahnya upah atau gaji membantu untuk menarik tenaga kerja ke tempat atau bidang di mana paling dibutuhkan.<sup>86</sup>

<sup>85</sup> Istilah Klasik dalam ilmu ekonomi mula-mula diperkenalkan oleh Karl Marx yang ditujukan dari teori-teori dari para ahli mulai dari David Ricardo, James Mill, dan pendahulu mereka. Pengertian Klasik versi Karl Marx ini kemudian diperluas oleh John Maynard Keynes, di mana mencakup aliran-aliran pemikiran ekonomi yang dominan antara kurun waktu 1970-an sampai 1930-an. Seperti Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823), James Mill (1773-1836) dan anaknya John Stuart Mill (1806-1873), Thomas Kobert Malthus (1766-1834). Pengertian Klasik menurut Keynes inilah yang kemudian digunakan secara luas oleh para ahli ekonomi di dalam berbagai diskusi atau buku teks Makro Ekonomi selama ini. Lihat Muana Nanga, *Makro Ekonomi : Teori, Masalah, dan Kebijakan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 35.

<sup>86</sup> Seperti halnya dengan barang-barang pada umumnya selalu ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran, demikian pula tingkat upah merupakan hasil pertemuan antara permintaan

Dengan demikian teori klasik juga memberikan pandangan bahwa *tingkat upah menentukan tingkat kesempatan kerja (jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan)*. Menurut teori Klasik, adanya pengangguran menunjukkan bahwa tingkat upah terlalu tinggi. Maka pengangguran dapat diatasi dengan menurunkan upah. Menurut mereka, setiap kenaikan upah akan mengurangi kesempatan kerja (karena tenaga kerja yang mahal akan diganti dengan mesin).<sup>87</sup>

Selain itu dari keyakinan kaum Klasik bahwa dalam perekonomian akan selalu terwujud keadaan keseimbangan dengan tingkat kesempatan kerja penuh, keadaan tersebut salah satunya dilatarbelakangi oleh *tingkat harga dan upah di dalam perekonomian adalah cukup fleksibel*, artinya harga-harga barang dan upah tenaga kerja sewaktu-waktu dapat dengan cepat disesuaikan (kalau diperlukan). Adanya *fleksibilitas* tingkat harga dan upah inilah menurut kaum klasik yang menjamin selalu tercapainya keseimbangan dengan kesempatan kerja penuh di dalam perekonomian.

Keyakinan Ahli-ahli klasik mengenai *fleksibilitas* tingkat upah pada umumnya bahwa ekonomi akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pula kepada satu keyakinan lain, yaitu apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian

---

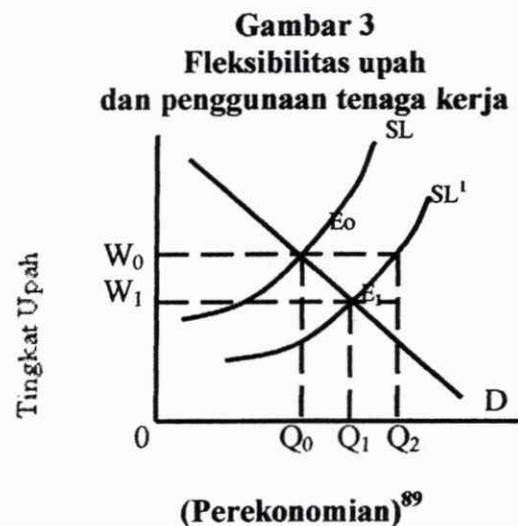
dan penawaran tenaga kerja harus terjadi di pasar tenaga kerja. Jadi bukan permintaan dan penawaran tenaga kerja secara individual oleh sebuah perusahaan dan seorang atau beberapa tenaga kerja. Lihat Suparmoko dan Maria, *Pokok-pokok Ekonomika* (Yogyakarta: BPFE, 2000), 266.

<sup>87</sup> Gilarsu, *Ekonomi Mikro*, 216.

diri dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan oleh karenanya pengangguran bukanlah suatu keadaan yang selalu terjadi dalam perekonomian. Keadaan ini menimbulkan kekuatan-kekuatan yang akan menurunkan tingkat upah, dari penurunan dalam tingkat upah ini akan memperluas tingkat kegiatan ekonomi. Di dalam analisis mereka ahli-ahli Klasik berkeyakinan :

- i. Para pengusaha akan selalu mencari keuntungan yang maksimum
- ii. Keuntungan maksimum akan dicapai pada keadaan di mana upah adalah sama dengan produksi fisik *marginal*.<sup>88</sup>

Berdasarkan kepada kedua keyakinan di atas, ahli-ahli ekonomi Klasik berpendapat bahwa penentuan upah dapat diterangkan dengan menggunakan Gambar 3.



<sup>88</sup> Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 72.

<sup>89</sup> Ibid.

## Keterangan:

- Wm = Wage market
- QL = Quantitas of labour
- SL = Supply of labour
- D = Demand
- E = Ekuilibrium
- VMPL = Value of marginal product of labour

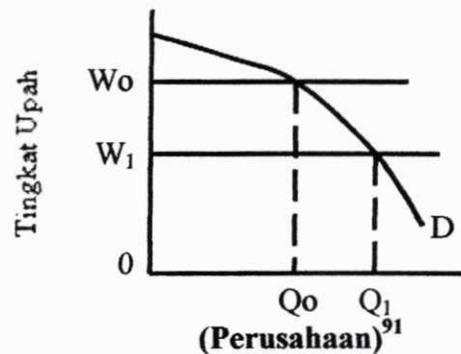
Dalam Gambar 3 grafik ditunjukkan permintaan (D) dan penawaran (SL dan SL 1) tenaga kerja dalam perekonomian.<sup>90</sup> Misalkan pada mulanya penawaran tenaga kerja adalah SL. Maka keseimbangan asal dari permintaan dan penawaran tenaga kerja dicapai di E<sub>0</sub>. Berdasarkan kepada keseimbangan ini tingkat upah adalah W<sub>0</sub> dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam perekonomian adalah Q<sub>0</sub>. Seterusnya, misalkan dalam perekonomian terjadi perubahan ke atas penawaran tenaga kerja. Perubahan ini digambarkan oleh perpindahan kurva penawaran SL menjadi SL<sub>1</sub>. Sebagai akibat perubahan ini, pada tingkat upah sebesar W<sub>0</sub> jumlah tenaga kerja yang ditawarkan adalah Q<sub>2</sub>, sedangkan seluruh pengusaha dalam perekonomian hanya ingin mengguna sebanyak Q<sub>0</sub> tenaga kerja. Dengan demikian terjadi pengangguran tenaga kerja sebanyak Q<sub>0</sub> - Q<sub>2</sub>. Kelebihan tenaga kerja ini akan mendorong kemerosotan upah sehingga tingkat di mana penawaran tenaga kerja yang baru sama dengan permintaan tenaga kerja. Keadaan itu dicapai di E<sub>1</sub>, dan dengan demikian upah adalah W<sub>1</sub> dan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam perekonomian adalah Q<sub>1</sub>.

---

<sup>90</sup> Ibid., 73.

Keadaan permintaan dan penggunaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan dijelaskan dalam Gambar 4.

**Gambar 4**  
**Fleksibilitas upah**  
**dan penggunaan tenaga kerja**



Keterangan:

- Wm = Wage market
- QL = Quantitas of labour
- SL = Supply of labour
- D = Demand
- E = Ekuilibrium
- VMPL = Value of marginal product of labour

Keadaan permintaan dan penggunaan tenaga kerja dalam suatu perusahaan ditunjukkan dalam grafik. Permintaan tenaga buruh oleh suatu perusahaan digambarkan oleh kurva D. Apabila tingkat upah adalah  $W_0$  perusahaan tersebut akan menggunakan  $Q_0$  tenaga kerja untuk memaksimalkan keuntungannya. Apabila upah merosot menjadi  $W_1$ ,

<sup>91</sup> Ibid.

perusahaan akan menggunakan Q1 untuk menambah dan memaksimalkan keuntungan.<sup>92</sup>

## 2. Pandangan Kaum Neo-Klasik

Kaum Neo-Klasik<sup>93</sup> juga mengeluarkan teorinya mengenai konsep penetapan upah yang antara lain mengemukakan, dalam rangka memaksimalkan keuntungan, setiap pengusaha menggunakan faktor-faktor produksi sedemikian rupa sehingga setiap faktor produksi yang dipergunakan menerima atau diberi imbalan sebesar nilai pertambahan hasil *marginal* dari faktor produksi tersebut. Ini berarti, pengusaha mempekerjakan sejumlah buruh sedemikian rupa sehingga nilai pertambahan hasil *marginal* seseorang sama dengan upah yang diterima orang itu.<sup>94</sup> Nilai pertambahan hasil *marginal* buruh merupakan nilai dari jasa yang diberikan buruh ke pengusaha. Sebaliknya, upah yang dibayarkan pengusaha ke buruh sebagai imbalan terhadap jasa buruh yang diberikan ke pengusaha.

Dengan asumsi *mobilitas* sempurna dari faktor-faktor produksi, setiap faktor produksi menerima imbalan senilai tambahan hasil *marginalnya* dan imbalan itu sama untuk berbagai alternatif penggunaan atau proses produksi.<sup>95</sup>

<sup>92</sup> Ibid., 73.

<sup>93</sup> Istilah Neo-Klasik ditujukan untuk tokoh-tokoh ekonomi seperti Leon Walras (1834-1910), Alfred Marshall (1842-1924), dan Knutt Wicksell (1851-1926). Ahli-ahli ekonomi Neo-Klasik merupakan tokoh-tokoh yang mengemukakan analisisnya sesudah kaum Klasik dan teori Mikro Ekonomi dibangun berdasarkan tulisan-tulisan kaum Klasik dan sumbangan utama datang dari kaum Neo-Klasik. Lihat Sukirno, *Mikro Ekonomi*, 243.

<sup>94</sup> Sudjana, *Buruh Menggugat*, 89.

<sup>95</sup> Tingkat upah dapat berbeda jika terjadi tingkat efisiensi manajemen perusahaan, semakin efektif semakin efisien cara-cara penggunaan faktor produksi. Lihat Simanjuntak, *Teori dan Sistem*

Demikian juga setiap pengusaha adalah *price taker*, artinya tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Pengusaha menjual hasil produksinya menurut harga pasar dan membeli faktor produksi dengan harga pasar juga. Dilihat dari segi buruh, buruh tidak bersedia tidak menerima upah yang lebih rendah dari nilai usaha kerja. Bilamana pengusaha tersebut membayar upah yang lebih rendah dari nilai usaha kerja buruh, buruh akan mencari kerja di tempat lain yang mampu membayar sama dengan usaha kerjanya. Dengan kata lain, dengan asumsi adanya *mobilitas* sempurna, buruh akan memperoleh upah senilai pertambahan hasil *marginalnya*. Persoalannya, pertambahan hasil *marginal* buruh selama ini lebih besar dari pada upah yang dibayarkan pengusaha, pengusaha dapat menambah keuntungan dengan menambah buruh. Di lain pihak, pengusaha tentu tidak bersedia membayar upah yang lebih besar dari nilai usaha kerja yang diberikan buruh ke pengusaha.

Untuk kondisi Indonesia, asumsi teori upah Neo-Klasik<sup>96</sup> itu tentu akan merugikan buruh sebagaimana yang terjadi selama ini. *Intervensi* dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk mencapai titik keseimbangan

---

*Pengupahan : Hubungan Industrial Pancasila dan Ketenagakerjaan di Indonesia* (Jakarta: YKPP, 1997), 242-252.

<sup>96</sup> Demikian juga penelitian-penelitian Malthus tentang tingkat upah dan jumlah penduduk di Inggris telah membawa dia kekesimpulan bahwa ada hubungan antara kedua faktor tersebut. Selanjutnya ahli-ahli ekonomi *Neo-klasik* menyodorkan pola teori upah sebagaimana banyak ditemukan dewasa ini dalam berbagai buku standar *Ekonomi Mikro-Teori* sebenarnya diturunkan dari produk *marginal*. Teori ini telah menjadi kontroversi satu abad lebih. Mendapat dukungan dan kritik juga. Selanjutnya adalah teori upah yang kontemporer sebagaimana dikemukakan Dunlop yakni persetujuan bersama antara serikat buruh dan majikan. Galbraith berpendapat, serikat buruh merupakan kekuatan pembalas terhadap kekuatan *Monopoli* dan *Oligopoli* yang merupakan konsentrasi kekuatan ekonomi modern. Kalau demikian, kekuatan serikat buruh dapat mengimbangi kemungkinan terjadinya *eksploitasi* sebagaimana diramalkan Joan Robinson dalam suatu pasar yang tidak sempurna. Lihat Sudjana, *Buruh Menggugat*, 89.

sebagaimana yang diharapkan dari teori upah itu. Tetapi, harus diingat, dalam situasi pasar tenaga kerja yang didominasi surplus tenaga kerja kurang terampil, kebijakan *intervensi* langsung terhadap upah buruh perlu dilakukan hati-hati.<sup>97</sup> Karena permintaan tenaga kerja dengan keterampilan minim cenderung *elastis*, sedikit saja kenaikan upah bisa mengakibatkan penurunan lapangan kerja yang besar. Kebijakan *intervensi* langsung terhadap upah buruh harus diimbangi dengan usaha-usaha peningkatan lapangan kerja, karena kompleksnya permasalahan pengupahan ini, diperlukan informasi lebih detail untuk menentukan kebijakan mana yang bisa meningkatkan upah buruh dengan cepat dan efisien namun tidak menjadi bumerang bagi lapangan kerja. Informasi itu misalnya, besarnya *elastisitas* permintaan harga kerja, *elastisitas substitusi*, serta identifikasi kekuatan perusahaan dalam menentukan upah di pasar.

### 3. Pandangan Adam Smith

Adam Smith<sup>98</sup> ternyata bukan saja terkenal sebagai pelopor ilmu ekonomi dan ahli ekonomi yang pertama kali mengemukakan pentingnya kebijakan *Laissez-faire*, tetapi juga merupakan ahli ekonomi pertama yang

<sup>97</sup> Pemerintah dalam menentukan *Intervensinya* harus mempertimbangkan beberapa unsur di antaranya adalah harga indek konsumen, perluasan kesempatan kerja, upah yang berlaku secara *regional*, dan perkembangan ekonomi, baik nasional maupun regional. Ibid., 92.

<sup>98</sup> Karena Adam Smith menganggap pentingnya arti akumulasi Kapital bagi pembangunan Ekonomi, maka sistem ekonomi yang dianut sesuai dengan pemikiran Adam Smith selain sering disebut sistem liberal (karena memberikan keleluasaan yang besar bagi tiap individu untuk bertindak dalam perekonomian) juga sering disebut sistem ekonomi Kapitalisme (karena sangat menekankan arti akumulasi kapital dalam pembangunan ekonomi). Lihat Deliarinov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, 37.

banyak menumpahkan perhatian kepada masalah pembangunan, seperti dapat dilihat dari judul bukunya, *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations*. Tulisan tersebut terutama menganalisis sebab-sebab berkembangnya ekonomi suatu negara. Selain itu teori yang dikeluarkan Adam Smith adalah mengenai dua nilai yaitu: *Pertama*, Nilai guna (*value in use*). *Kedua*, Nilai tukar (*value in exchange*). Nilai tukar atau harga suatu barang ditentukan oleh jumlah tenaga (*Labour*) yang diperlukan untuk menghasilkan barang tersebut. Bagaimana menentukan jumlah tenaga kerja yang dicurahkan untuk menghasilkan suatu barang? Menurut Adam Smith, untuk mengukur tenaga *Labour* yang dicurahkan dalam menghasilkan suatu barang atau jasa tidak hanya bisa diukur dari jam atau hari kerja, sebab keterampilan setiap orang tidak sama.<sup>99</sup> Untuk itu Adam Smith menggunakan "harga" *labour* sebagai alat ukur, yaitu upah yang diterimanya dalam menghasilkan barang tersebut. Tingkat upah sekaligus menentukan perbedaan tingkat ketrampilan *labour*, kalau A menerima upah Rp 10.000,- dan B menerima upah Rp 5.000,- per hari, ini mencerminkan bahwa ketrampilan atau skill Si A dua kali lebih tinggi dari keterampilan Si B.

---

<sup>99</sup> Dalam tulisan-tulisannya, Smith cukup banyak memberikan perhatian pada produktivitas tenaga kerja. Dan hasil pengamatannya yang cukup mendalam, Smith mengambil kesimpulan bahwa produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan melalui apa yang disebutnya pembagian kerja (*division of labour*) menurut ketrampilannya pembagian kerja akan mendorong *spesialisasi*, di mana orang akan memilih mengerjakan yang terbaik sesuai dengan bakat dan kemampuannya masing-masing. *Ibid.*, 36.

Perbedaan dalam tenaga kerja yang dicurahkan dalam menghasilkan barang digunakan Adam Smith untuk mematok harga. Misalnya, jika dalam waktu dua jam seseorang rata-rata bisa menangkap seekor berang-berang, dan dalam waktu yang sama bisa digunakan untuk menangkap dua ekor rusa, maka harga berang-berang harus dua kali lipat harga rusa. Harga seperti ini yang disebut Adam Smith sebagai harga alami (*Natural price*) yang dalam zaman modern sekarang disebut harga keseimbangan.<sup>100</sup>

#### 4. Pandangan David Ricardo

David Ricardo sering dianggap sebagai pakar aliran klasik yang sangat gemilang selain Adam Smith. Tetapi kehebatannya dalam melakukan analisis ekonomi juga paling banyak mendapat kecaman, sebab dalam melakukan analisis David Ricardo<sup>101</sup> sering bersikap "tegar dan dingin", dan sebagai akibatnya ilmu ekonominya sering dikritik sebagai *dismal science*. Ilmu ekonomi kemudian diejek sebagai ilmu yang "tidak berperasaan" sebab dalam melakukan pembahasan para pakar seperti David Ricardo berusaha lebih

---

<sup>100</sup> Ibid., 34-35.

<sup>101</sup> David Ricardo (1772-1823) kalau dilihat sejarah hidupnya, Ricardo tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang cukup. Tetapi pekerjaannya dalam bidang pasar modal yang sudah digelutinya sejak berusia 14 tahun membuatnya paham tentang dunia ekonomi. Adalah James Mill, Bapak John Stuart Mill, yang berjasa mendorong Ricardo untuk menulis tentang masalah-masalah ekonomi, permintaan dikabulkan lagi pula keberuntungan berbisnis dalam pasar modal memungkinkannya untuk pensiun pada umur 42 tahun dan memulai karirnya sebagai ekonom. Ricardo sependapat dengan Smith bahwa *labour* memegang peran penting dalam perekonomian. Ibid., 53.

banyak menggunakan *rasio* (pikiran, akal sehat) dan menghindari unsur perasaan atau sentimen.<sup>102</sup>

Tentang teori nilai kerja dan upah alami Ricardo menjelaskan bahwa nilai tukar suatu barang ditentukan oleh ongkos yang perlu dikeluarkan untuk menghasilkan barang tersebut, yaitu biaya untuk bahan mentah dan upah buruh yang besarnya hanya cukup untuk dapat bertahan hidup (*subsisten*) bagi buruh yang bersangkutan. Upah buruh yang besarnya cukup hanya untuk dapat bertahan hidup ini disebut upah alami (*natural wage*). Menurut David Ricardo, kalau harga yang ditetapkan lebih besar dari biaya-biaya (termasuk upah alami), maka dalam jangka pendek perusahaan akan menikmati laba ekonomi. Adanya laba ini akan menarik perusahaan-perusahaan lainnya masuk pasar. Masuknya perusahaan-perusahaan baru berarti produksi akan meningkat, dan sebagai akibatnya akan terjadi kelebihan produksi (*oversupply*)<sup>103</sup> di pasar. Kelebihan penawaran barang ini akan mendorong harga-harga turun kembali kepada keseimbangan semula, karena biaya-biaya bahan mentah relatif konstan, maka David Ricardo menyimpulkan bahwa yang paling menentukan tingkat harga adalah tingkat upah alami, yang besarnya hanya cukup agar para buruh dapat bertahan hidup saja (hidup secara

<sup>102</sup> Ibid., 55.

<sup>103</sup> Karena tujuan utama perusahaan adalah memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya, maka mereka menjual semua yang diproduksi. Ini berarti bahwa kemampuan menjual sebuah produk menjadi kriteria pokok dalam menentukan barang dan usaha produksi. Demi pilihan dan perdagangan bebas, seseorang mungkin akan menjual apa saja kepada orang lain, dan ini membuktikan bahwa barang yang tersedia berkoresponden dengan potensi permintaan. Lihat Salmi, *Kekerasan dan Kapitalisme*, 53.

*subsisten*). Menurut Ricardo, biasanya tingkat upah alami ini ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan setempat (*custom*). Biasanya tingkat upah alami ini naik *proportional* dengan standar hidup masyarakat.<sup>104</sup>

---

<sup>104</sup> Deliarov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, 53.